

## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **7.1. Kebijakan Umum**

Arah Kebijakan Umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Sragen yang sejahtera adil dan makmur. Sragen yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan Ilmu teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2011-2016) terbagi menjadi tiga tahap pembangunan, yaitu tahap penyelarasan/penyesuaian (tahun 2011), tahap peningkatan kualitas **pelayanan publik (tahun 2012-2013), dan tahap perwujudan Sragen** yang sejahtera adil dan makmur (tahun 2014-2016).

#### **A. Tahap Penyelarasan /penyesuaian (2011)**

Tahap ini merupakan tahap penyesuaian (penyelarasan) program-program yang telah disusun dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2011-2016 serta percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. kebijakan prioritas pembangunan pada tahap penyelarasan/penyesuaian untuk melanjutkan pembangunan guna mencapai Sragen sejahtera adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan pelayanan kesehatan;

2. Peningkatan wajib belajar pendidikan dasar;
3. Peningkatan potensi ekonomi lokal;
4. Reformasi birokrasi dan mutasi serta promosi pegawai;
5. Peningkatan jalan potensial ekonomi (infrastruktur);
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam;
8. Penyediaan tempat distribusi barang dan jasa;
9. Arah pembangunan pro rakyat (*mbelo wong cilik*).

#### **B. Tahap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2012 - 2013)**

Tahap ini merupakan tahap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan publik agar terwujud percepatan kesejahteraan masyarakat Sragen. Kebijakan pada tahap ini yang sangat penting untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak azasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab. Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap peningkatan kualitas pelayanan publik adalah antara lain sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
2. Peningkatan pendidikan terjangkau sampai tingkat SLTA;
3. Peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi lokal;
4. Peningkatan reformasi birokrasi birokrasi dan mutasi serta promosi pegawai;
5. Pemantapan jalan potensial ekonomi (infrastruktur);
6. Pemantapan kualitas pelayanan public;
7. Peningkatan penyediaan tempat distribusi barang dan jasa;

8. Pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam;
9. Pemantapan pembangunan ke arah pro rakyat.

### **C. Tahap perwujudan Sragen sejahtera adil dan makmur (2014-2016)**

Pada tahap ini lebih menekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat Sragen dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan sumberdaya alam. Kebijakan pada tahap ketiga ini untuk memperkuat dimensi keadilan, semangat juang dan kejujuran dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan gender.

Keadilan juga, hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih dan adil serta tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap perwujudan masyarakat Sragen sejahtera lahir dan batin antara lain sebagai berikut.

1. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan;
2. Lebih mantapnya pelayanan pendidikan tingkat SD ke atas;
3. Semakin mantapnya pengelolaan potensi ekonomi lokal;
4. Semakin mantapnya reformasi birokrasi dan mutasi serta promosi pegawai;
5. Lebih mantapnya jalan potensial ekonomi (infrastruktur);
6. Lebih mantapnya kualitas pelayanan publik;
7. Pemantapan penyediaan tempat distribusi barang dan jasa;

8. Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan;
9. Penanggulangan kemiskinan yang lebih substansif dan koordinatif;
10. Peningkatan PAD dan PDRB serta investasi daerah;
11. Peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakatnya;
12. Lebih mantapnya arah pembangunan yang pro rakyat (*mbelo wong cilik*).

## **7.2. Program Pembangunan**

### **7.2.1. Program pada Setiap SKPD**

Penekanan pada arah kebijakan ini adalah mewujudkan dukungan yang optimal atas ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pada gilirannya dapat mendukung kinerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui program-program:

**a. Program pelayanan administrasi perkantoran**, dengan indikasi kegiatan meliputi:

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan administrasi perkantoran serta pemeliharaannya;
- 2) Penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informasi serta sumber daya air dan listrik perkantoran;
- 3) Penyediaan honorarium tenaga kontrak daerah.

**b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**, dengan indikasi kegiatan meliputi penyediaan sarana dan prasarana fisik operasional di dalam dan di luar lingkungan kantor serta pemeliharaannya.

**c. Program peningkatan disiplin aparatur**, dengan indikasi kegiatan antara lain berupa:

- 1) Pengadaan mesin/kartu absensi;

- 2) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
- 3) Pengadaan pakaian kerja lapangan.

**d. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS,** dengan indikasi kegiatan antara lain:

- 1) Pemulangan pegawai yang pension;
- 2) Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas;
- 3) Pemindahan tugas PNS.

**e. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur,** dengan indikasi kegiatan antara lain:

- 1) Pendidikan dan pelatihan formal;
- 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- 3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

**f. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,** dengan indikasi kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran;
- 3) Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran.

### **7.2.2. Program dalam Setiap Urusan**

#### **A. Pelayanan Urusan Wajib**

##### **1. Pendidikan**

Arah kebijakan urusan pendidikan ini adalah perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas melalui program-program:

**1) Program pendidikan anak usia dini,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengembangan sarana dan prasarana PAUD formal;

- b. Penyiapan akreditasi TK;
- c. Pembangunan gedung sekolah;
- d. Penambahan ruang kelas dan ruang guru;
- e. Peningkatan kualitas pengajaran dan bahan ajar PAUD.

**2) Program wajib belajar pendidikan dasar ,\*\*)** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pembangunan gedung sekolah;
- b. Penambahan ruang kelas dan ruang guru sekolah;
- c. Peningkatan kualitas pengajaran dan bahan ajar.

**3) Program pendidikan menengah,\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain:

- a. Pembangunan gedung sekolah;
- b. Penambahan ruang kelas dan ruang guru sekolah;
- c. Peningkatan kualitas pengajaran dan bahan ajar.

**4) Program pendidikan non formal,\*\*)** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal;
- b. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal;
- c. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan.

**5) Program pendidikan luar biasa, \*)** dengan indikasi kegiatan antara lain:

- a. Pembangunan gedung sekolah;
- b. Penambahan ruang kelas dan ruang guru sekolah;
- c. Peningkatan kualitas pengajaran dan bahan ajar.

**6) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan \*\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan sertifikasi tenaga pendidikan;

- b. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi;
- d. Peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT.

**7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan\*\*)**

dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan;
- b. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan.

**8) Program Pendidikan Berkelanjutan,** dengan indikasi kegiatan meliputi fasilitasi pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa

**9) Program Peningkatan Peran Serta Anak dan kesejahteraan Gender dalam Pembangunan, \*)**dengan indikasi kegiatan berupa pengarusutamaan gender bidang pendidikan.

**10) Program Pendidikan non Formal,\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembinaan pendidikan keagamaan
- b. Sosialisasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan

**11) Program aksi pendidikan murah dan bermutu\*)**

dengan indikasi kegiatan antara lain:

- a. Peningkatan kesejahteraan guru\*);
- b. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan \*);
- c. Kesempatan memperoleh pendidikan \*);
- d. Beasiswa bagi penduduk miskin dan cerdas\*).

## **2. Kesehatan**

Penekanan arah kebijakan di urusan ini antara lain pemberdayaan Individu, keluarga dan masyarakat agar tumbuh perilaku hidup sehat dan kemandirian serta peningkatan profesionalisme SDM dengan indikasi program sebagai berikut.

**1) Program Farmasi dan perbekalan kesehatan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
- b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
- c. Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin\*)

**2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat \*\*),** dengan Indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya\*)
- b. Layanan puskesmas gratis dan bermutu\*)
- c. Penanggulangan penyalahgunaan NAPZA\*)
- d. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

**3) Program Kefarmasian, Alat kesehatan dan makanan\*\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembinaan dan pengawasan peredaran obat komunitas dan klinik
- b. Pembinaan dan pengawasan obat tradisional

**4) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu\*)
- b. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu \*)

**5) Program perbaikan gizi masyarakat, dan pembinaan sosial\*\*) dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.**

- a. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
- b. Pemberian tambahan makanan dan vitamin

**6) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat \*) dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.**

- a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
- b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
- c. Revitalisasi Posyandu \*)
- d. Penyediaan jasa promosi kesehatan
- e. Penyediaan jasa farmasi dan jasa pelayanan

**7) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita,\*) dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.**

- a. Penyuluhan kesehatan anak balita \*\*)
- b. Imunisasi bagi anak balita \*\*)
- c. Rekrutmen tenaga pelayanan perawatan kesehatan anak balita

**8) Program pengembangan lingkungan sehat,\*) dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.**

- a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
- b. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
- c. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

**9) Program pencegahan & penanggulangan penyakit \*\*),**

dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Penyuluhan penyebaran penyakit DB;\*)
- b. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan *fogging*;
- c. Pengadaan vaksin penyakit menular dan tidak menular;
- d. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

**10) Program akses kesehatan dan standarisasi pelayanan kesehatan, \*\*)** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Penyusunan standar pelayanan kesehatan;
- b. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan;
- c. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan.

**11) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin \*),**

dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pelayanan operasi katarak;
- b. Pelayanan kesehatan THT;
- c. Pelayanan operasi bibir sumbing;
- d. Penyediaan jasa penguburan pasien tidak mampu, klaim pembayaran darah dan alat kesehatan.

**12) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan,**

dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
- b. Kemitraan pencegah dan pemberantas penyakit menular
- c. Kemitraan pengelolaan limbah rumah sakit

**13) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pembangunan puskesmas pembantu

b. Pengadaan puskesmas keliling

c. Pembangunan posyandu \*)

**14) Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit,** dengan indikasi sebagai berikut.

a. Pembangunan rumah sakit;

b. Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit;

c. Pembangunan gedung obat/apotik;

d. Rehabilitasi ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III);

e. Pengadaan obat-obatan rumah sakit;

f. Pengadaan mebeuleur rumah sakit;

g. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

**15) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

a. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit;

b. Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit;

c. Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik;

d. Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III);

e. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit;

f. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit.

**16) Program peningkatan kapasitas SDA,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

a. Pendidikan dan pelatihan non formal;

b. Peningkatan ketrampilan di bidang teknis medis;

c. Peningkatan ketrampilan di bidang manajerial.

**17) Program sumber daya kesehatan dan manajemen kesehatan\*\*)**

- a. Peningkatan kualitas pendidikan.

**18) Program aksi Kesehatan Murah dan berkualitas \*)**

- a. Cakupan menyeluruh Jaminan Kesehatan Masyarakat\*);
- b. Penguatan kesadaran gerakan hidup sehat\*).

**3. Pekerjaan Umum**

Penekanan arah kebijakan dalam urusan ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana jalan jembatan serta fasilitas umum melalui program-program:

**1) Program Pembangunan infrastruktur perdesaan,\*)** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan;
- b. Pembangunan pasar perdesaan;\*);
- c. Pembangunan jalan dan jembatan desa.\*)

**2) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;

**3) Program pengembangan air minum dan air limbah,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;\*);
- b. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah;
- c. Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah.

**4) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembangunan/peningkatan infrastruktur\*);

**5) Program Aksi pembangunan Infrastruktur perkotaan. \*)**

dengan indikasi kegiatan antara lain:

- a. Pemantapan Sragen yang aman, Sehat, rapi dan Indah\*);
- b. Air bersih bagi semua \*)

**6) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Evaluasi dan monitoring;
- b. Pra survey dan peningkatan jalan dan jembatan;
- c. Pembangunan jalan poros desa.

**7) Program Pembangunan turap/talud/bronjong,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.

**8) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;

**9) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong;
- b. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong;
- c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

**10) Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Inspeksi kondisi jalan;
- b. Inspeksi kondisi jembatan;
- c. Monitoring, *evaluasi* dan pelaporan.

**11) Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat;
- b. Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat.

**12) Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyusunan sistem informasi/data base jalan;
- b. Penyusunan sistem informasi/data base jembatan;
- c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

**13) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengadaan alat-alat berat;
- b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat;
- c. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat.

**14) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi;
- b. Pembangunan reservoir/embung.

**15) Program penyediaan dan pengolahan air baku,** dengan indikasi antara lain kegiatan sebagai berikut.

- a. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa;
- b. Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa;
- c. Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa.

**16) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembangunan embung, dan bangunan penampung lainnya;.

- b. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya\*)

**17) Program pengendalian banjir, \*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembangunan reservoir pengendali banjir\*);
- b. Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir;
- c. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai.

**18) Pengaturan jasa konstruksi,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Verifikasi ijin usaha jasa konstruksi;
- b. Pembinaan forum pengadaan.

#### **4. Perumahan Rakyat**

Penekanan kebijakan urusan ini antara lain tercukupinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat, dengan program-programnya sebagai berikut.

**1) Program pengembangan perumahan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM);
- c. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana tempat keagamaan.

**2) Program lingkungan sehat,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan;
- b. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.\*)

**3) Program perbaikan perumahan \*\*)** akibat bencana alam/sosial, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam;
- b. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial.

**4) Program pengelolaan areal pemakaman,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman;
- b. Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal

**5) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

## **5. Penataan Ruang**

Penekanan arah kebijakan dalam urusan ini antara lain mengembangkan pendekatan integrasi bagi pembangunan desa dan kota, dengan program-program sebagai berikut.

**1) Program perencanaan tata ruang,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang;
- b. Penyusunan rencana tata ruang wilayah;
- c. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan;
- d. Revisi rencana tata ruang.

**2) Program Pemanfaatan Ruang,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang.

**3) Program pengendalian pemanfaatan ruang,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyusunan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Pengawasan pemanfaatan ruang.

**4) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH),** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyusunan kebijakan, norma, standar prosedur dan manual pengelolaan RTH;
- b. Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH;
- c. Pengembangan taman rekreasi.\*)

## **6. Perencanaan Pembangunan**

Penekanan arah kebijakan ini antara lain untuk meningkatkan kualitas Pelayanan yang lebih profesional, dengan program-programnya sebagai berikut.

**1) Program Pengembangan Data/Informasi,\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capai target kinerja program dan kegiatan;
- b. Penyusunan dan pengumpulan data/konfirmasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.

**2) Program kerjasama pembangunan,\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan;

b. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah.

**3) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, \*)** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah;
- b. Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan perbatasan antar wilayah.

**4) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- b. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh.

**5) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
- b. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

**6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik;
- b. Koordinasi penyusunan laporan Kinerja Pemda.

**7) Program Perencanaan Sosial dan Budaya,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan;

- b. Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan;
- c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya.

**8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Koordinasi penyusunan profil daerah;
- b. Koordinasi pembangunan ;
- c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

**9) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah;
- b. Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

**10) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Koordinasi penyusunan profil daerah;
- b. Koordinasi pembangunan daerah.

**11) Program Aksi Sinergitas Pembangunan\*),** dengan kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Optimalisasi rembug warga\*);
- b. Pengembangan kerjasama daerah perbatasan.\*)

## **7. Perhubungan**

Penekanan arah kebijakan ini adalah pengembangan sarana dan prasarana transportasi, sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah melalui program-program:

**1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas transportasi\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- b. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan;
- c. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.\*)

**2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor;
- b. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor.

**3) Program peningkatan pelayanan angkutan,\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang;\*)
- b. Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan;
- c. Temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang.

**4) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembangunan gedung terminal;
- b. Pembangunan halte bus;
- c. Pembangunan jembatan penyeberangan gedung terminal.

**5) Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor;
- b. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor;
- c. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor.

## **8. Lingkungan Hidup**

Penekanan arah kebijakan ini adalah peningkatan kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui program-program sebagai berikut.

**1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan \*\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura;
- b. Pemantauan kualitas lingkungan;
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- d. Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa ijin (PTT).

**2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,\*\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air;
- b. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan;
- c. Pengendalian dampak perubahan iklim;

d. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan.

**3) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam,\*\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. Koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan;
- c. Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan.

**4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan;
- b. Pengembangan data dan informasi lingkungan;
- c. Penyusunan data sumber daya alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) nasional dan daerah.

**5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengujian emisi kendaraan bermotor;
- b. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri;
- c. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair.

**2) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi;
- b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**3) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, air minum dan sanitasi \*\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah;
- b. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan;
- c. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

### **13. Pertanahan**

Penekanan arah kebijakan ini adalah peningkatan kualitas pengelolaan administrasi dan pelayanan pertanahan melalui program-program sebagai berikut.

**1) Program pembangunan sistem pendaftaran tanah,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyusunan sistem pendaftaran tanah;
- b. Sosialisasi sistem pendaftaran tanah.

**2) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. Penyuluhan hukum pertanahan.

**3) Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan,** dengan indikasi kegiatan antara lain: fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

### **10. Kependudukan dan Catatan Sipil**

Penekanan arah kebijakan pada urusan adalah pengendalian pertumbuhan dan kualitas penduduk serta meningkatkan sarana dan prasarana pengadaan akta catatan sipil dan kependudukan, dengan indikasi program:

**1) Program Penataan Administrasi Kependudukan,\*)**

dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu;
- b. Pelatihan tenaga pengelola SIAK.

**2) Program peningkatan kualitas pendataan** dengan indikasi kegiatan antara lain:

- a. Pelatihan registrasi kependudukan;
- b. Pelatihan pengolahan program komputer dalam pengolahan data Kependudukan.

**11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Penekanan arah kebijakan dalam urusan ini adalah meningkatkan perangkat hukum yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatkan kampanye anti kekerasan dengan indikasi program:

**1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan,\*\*) dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.**

- a. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.

**2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, \*\*) dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.**

- a. Advokasi dan fasilitasi PUG di seluruh tingkat pemerintahan;
- b. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak DPPA;

- c. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.

**3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan daerah;
- b. Pelatihan bagi pelatih (*TOT*) SDM pelayanan dan pendamping korban KDRT
- c. Penyusunan sistem/kelembagaan perlindungan bagi perempuan dan anak

**4) Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembinaan dan optimalisasi organisasi wanita
- b. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

**12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera\*)**

Tekanan arah kebijakan dalam urusan ini adalah pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan keluarga yang lebih sejahtera, melalui program-program sebagai berikut.

**1) Program keluarga berencana,\*\*) dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.**

- a. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin;
- b. Pelayanan KIE;
- c. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu;
- d. Promosi pelayanan KHIBA.

- 2) Program kesehatan reproduksi remaja,\*\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.
- a. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR);
  - b. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat.
- 3) Program pelayanan kontrasepsi,\*\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.
- a. Pelayanan konseling KB;
  - b. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB.
- 4) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.
- a. Fasilitasi pembentukan kelompok peduli masyarakat peduli KB.
- 5) Program promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.
- a. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.\*\*)
- 6) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.
- a. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR;
  - b. Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah.
- 7) Program peningkatan penanggulangan narkoba. PMS termasuk HIV/AIDS,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.
- a. Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah\*).

**8) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembentukan tumbuh kembang anak.

**9) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.

**10) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan.

### **13. Sosial**

Tekanan arah kebijakan dalam urusan ini antara lain meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial anak-anak dan keluarga dengan program-program:

**1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut \*\*)

- a. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi(KRSE) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) melalui KUBE;
- b. Penyediaan akses perumahan melalui rehabilitasi sosial bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

**2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan**

**Sosial**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pelayanan sosial anak dalam balai dan non balai
- b. Pelayanan sosial lanjut usia\*)
- c. Pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat

**3) Program Pembinaan Balai Asuhan/Balai Jompo**, dengan

indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembangunan sarana dan prasarana balai asuhan/jompo;
- b. Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo;\*)
- c. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo.

**4) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial**

**(Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Diklat ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial;\*)
- b. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial \*).

**5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan**

**Sosial**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha;
- b. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.

**6) Program perlindungan dan jaminan sosial\*\*)** dengan

indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Penanganan korban bencana alam;
- b. Penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja migrant;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial.

**7) Program pembinaan anak terlantar,\*\*)** dengan indikasi

kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembinaan anak jalanan dan anak potensial dari keluarga kurang mampu.

**8) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penanganan penyandang cacat;
- b. Pemberdayaan tim advokasi difabel (penyandang cacat).

**9) Program pencegahan dini penanggulangan bencana alam,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyediaan bahan bantuan bencana alam

**6) Program Pengembangan Kesejahteraan sosial,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Sosialisasi tentang hidup sehat.

**7) Program Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penduduk yang telah berusia lanjut,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Pembinaan penduduk usia lanjut di luar panti

#### **14. Ketenagakerjaan**

Tekanan arah kebijaksanaan ini antara lain meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja dengan program-program:

**1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyusunan data base tenaga kerja daerah
- b. Pembangunan balai latihan kerja
- c. Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja

**2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

b. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

c. Kerjasama pendidikan dan pelatihan;

**3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan\*\*)** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

a. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur antara lain tenaga kerja

b. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

c. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

**4) Program Pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga Kerja,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

a. Pelatihan tentang etos kerja.

**5) Program Usaha Kerja Produktif (UKP) bagi penduduk miskin** dengan indikasi kegiatan antara lain:

a. Pelatihan teknologi tepat guna bagi penduduk miskin.

b. Pelatihan manajemen kelompok bagi warga miskin.

## **15. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Penekanan arah kebijakan ini antara lain mengembangkan kualitas SDM dan kemandirian koperasi dan UMKM dengan indikasi program:

**1) Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Kondusif,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

a. Penyusunan kebijakan tentang usaha mikro kecil dan menengah;

- b. Sosialisasi kebijakan tentang usaha mikro kecil menengah;\*)
- c. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha mikro kecil dan menengah;
- d. Pendirian unit penanganan pengaduan.

**2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Menengah,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
- b. Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi usaha, mikro kecil dan menengah dengan perusahaan asing
- c. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah

**3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
- b. Pengembangan Water bisnis

**4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian

**5) Program Peningkatan kapasitas IPTEK Sistem Produksi,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengembangan system inovasi teknologi industri
- b. Penguatan kemampuan industry berbasis teknologi

**6) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
- b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

**7) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembinaan kemampuan teknologi industri
- b. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

**8) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyediaan sarana yang dapat diakses masyarakat;
- b. Penyediaan sarana prasarana industri

## **16. Penanaman Modal**

Penekanan arah kebijakan ini antara lain untuk meningkatkan dan mendayagunakan investasi usaha pemerintah dengan indikasi program sebagai berikut.

**1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah;
- b. Pengembangan potensi unggulan daerah;
- c. Penyelenggaraan pameran investasi.

**2) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur;

- b. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi;\*\*)
  - c. Penyusunan raperda penanaman modal;
  - d. Penyusunan sistem informasi dan dokumen perijinan;
  - e. Sosialisasi pelayanan dan perijinan terpadu.

**3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi.

## **17. Kebudayaan**

Penekanan arah kebijakannya antara lain mengembangkan seni dan budaya lokal melalui program-program berikut.

**1) Program Pengembangan Nilai Budaya,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
- b. Penatagunaan naskah kuno nusantara
- c. Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah

**2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
- b. Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan
- c. Penyelenggaraan dialog kebudayaan

**3) Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Inventarisasi data organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## **18. Kepemudaan dan Olah Raga**

Penekanan arah kebijakannya antara lain peningkatan peran pemuda dalam pembangunan dengan program-program:

**1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembinaan organisasi kepemudaan;
- b. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan.

**2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda;
- b. Pelatihan keterampilan bagi pemuda;
- c. Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP).

**3) Program Peningkatan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga;
- b. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah;
- c. Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih, dan teknisi olahraga.

**4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- b. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

## **19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Penekatan arah kebijakan dalam urusan ini adalah mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan kesadaran bela Negara melalui program-program sebagai berikut.

**1) Program pendidikan politik masyarakat dan pembinaan kesatuan bangsa\*\*)** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Penyuluhan kepada masyarakat;\*\*)
- b. Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik;
- c. Koordinasi forum-forum diskusi politik.

**2) Program pengembangan wawasan kebangsaan,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
- b. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat.

**3) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.

**4) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- b. Pembangunan pos jaga/ ronda;\*)
- c. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah;

- e. Pembinaan pedagang kaki lima;\*)
- f. Kerjasama TNI, Polri dan Kejaksaan;
- g. Penyuluhan Perda perijinan kepada masyarakat;
- h. Operasi perda perijinan dan penertiban

**5) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat** (pekat), dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba;\*\*)
- b. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi;\*)
- c. Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu;
- d. Penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat lainnya.

**6) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana;
- b. Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam.

## **20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

Penekanan arah kebijakan pada urusan ini antara lain mengembangkan kapasitas SDM aparatur Pemerintah Daerah yang lebih professional dengan program-program sebagai berikut.

**1) Program peningkatan kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembahasan rancangan peraturan daerah;
- b. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.

**2) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Dialog/audensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan;
- b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri;
- c. Pelatihan keprotokolan.

**3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyusunan standar satuan harga;
- b. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- c. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

**4) Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota;
- b. Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/ kota;

- c. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

**5) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi,**

dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik;
- b. Penilaian pelaksanaan pelayanan publik;
- c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

**6) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi.

**7) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan dan efektivitas pelaksanaan produk hukum daerah;\*\*) )
- b. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan bantuan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

**8) Program Pendidikan Kedinasan,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pendidikan dan pelatihan teknis;
- b. Pendidikan penjenjangan structural;
- c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
- d. Pembuatan buku juknis/juklak.

**9) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah;
- b. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah;
- c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;

**10) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur daerah,\* )** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS;
- b. Seleksi penerimaan CPNS;
- c. Penempatan PNS;
- d. Pendataan tenaga honorer daerah.

**11) Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Penyusunan pedoman umum perangkat daerah;
- b. Pembentukan perangkat daerah;
- c. Penyusunan pedoman teknis perangkat daerah.

**12) Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Penyusunan pedoman tata naskah dinas;
- b. Penyusunan pedoman pakaian dinas;
- c. Penyusunan pedoman tata ruang kantor;
- d. Penyusunan buku daftar nama dan alamat pejabat.

**13) Program Pendayagunaan Aparatur Daerah,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Penyelenggaraan rapat koordinasi PAN daerah;
- b. Publikasi /sosialisasi kebijakan PAN daerah;
- c. Penyusunan kebijakan bidang PAN daerah;

- d. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**14) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penatausahaan SKPD, SKRD, dan optimalisasi peran manpa dan UPTD.

**15) Program pengembangan potensi pendapatan daerah,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pendataan pajak dan retribusi daerah;
- b. Pensertifikatan tanah dan pengadaan papan nama kodefikasi.

**16) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa,** kegiatannya antara lain antara lain:

- a. Evaluasi rancangan Perdes tentang APBD Desa dan perubahannya

**18) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH,** indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
- b. Inventarisasi temuan pengawasan;
- c. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat (survey kepuasan pelanggan).

**42) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

- b. Pembentukan Satgas SPIP Tingkat Kabupaten dan masing-masing SKPD

**43) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
- b. Pelatihan operator SIMWAS

**44) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan**

**Masyarakat,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
- b. Operasional Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

**46) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

**47) Program aksi percepatan reformasi pemerintahan,\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain:

- a. Penyempurnaan *one stop* service melalui penyederhanaan perijinan
- b. Akte Kelahiran, KTP dan KK Gratis\*)

**48) Program aksi peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset Daerah,\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain adalah:

- d. Penyelamatan dan optimalisasi aset pemerintah daerah yang Terbengkelai.\*)

**49) Program Aksi Percepatan Anti Korupsi, Kolusi dan**

**Nepotisme \*)** ,dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Implementasi fakta integritas bagi pejabat pemerintahan
- b. Rekrutmen CPNS yang bersih dan transparan.\*)

**55) Program Pembangunan dan pengembangan inkubator**

**bisnis di seluruh kecamatan Kabupaten Sragen,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Adanya globalisasi seluruh kecamatan diharapkan memiliki inkubator bisnis setiap tahun 5 desa di masing-masing kecamatan

**56) Program Peningkatan kesempatan kerja (peningkatan kualitas lulusan pelatihan) dengan mengikutsertakan**

**uji kompetensi profesi,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Terwujudnya lulusan pelatihan badan diklat dan litbang yang bersertifikasi kompetensi profesi

## **21. Ketahanan Pangan**

Penekanan arah kebijakan pangan yaitu pengembangan sistem Ketahanan pangan berkelanjutan,dengan program-program sebagai berikut.

**1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan,** dengan indikasi

kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penanganan daerah rawan pangan\*)
- b. Penyusunan database potensi produk pangan

- 2) Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan,** dengan indikasi kegiatan antara lain
- a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
  - b. Pengembangan Lumbung pangan masyarakat\*)
- 3) Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.
- a. Peningkatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
  - b. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
- 4) Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.
- a. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
  - b. Pemantauan dan analisa harga pangan pokok
- 5) Program aksi swasembada pangan berkelanjutan. \*)**  
Dengan indikasi kegiatan antara lain:
- a. Memantapkan kecukupan pangan bagi seluruh warga masyarakat.
  - b. Melakukan upaya-upaya swasembada pangan berkelanjutan.\*)
- 6) Program Pengembangan Agrobisnis,\*\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:
- a. Pelatihan tentang pengelolaan produk pertanian pasca panen

## **22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Tekanan arah kebijakan pada urusan ini antara lain optimalisasi fungsi Lembaga ekonomi masyarakat melalui program-program:

**1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan,\*\*)** dengan indikasi kegiatan s antara lain sebagai berikut.

- a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan\*)
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat

**2) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, \*\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
- b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
- c. Pemberian stimulan pembangunan desa

**3) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa,\*\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan
- b. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
- c. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa

**4) Program peningkatan peran perempuan di pedesaan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

**5) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pelatihan ketrampilan budidaya tanaman\*)
- b. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
- c. Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan\*)

**6) Program pengembangan data,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pendataan profil desa dan kelurahan

**7) Program pengentasan kemiskinan,\*)**

dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Unit pengaduan masyarakat dan pemantauan (UPMP) raskin
- b. Penunangan administrasi pemugaran perumahan penduduk miskin
- c. Pelatihan kader pesyandu menuju sistem informasi posyandu (SIP)

## **23. Statistik**

Tekanan arah kebijakan dalam urusan ini antara lain peningkatan kualitas pendataan dengan program-program:

- 1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.
  - a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
  - b. Pengelolaan, updating dan analisis data statistik daerah

## **24. Kearsipan**

Tekanan arah kebijakan dalam urusan ini antara lain meningkatkan penataan kearsipan yang lebih professional dengan program-program:

- 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.
  - a. Pembangunan database informasi kearsipan

- b. Pengumpulan data
- c. Pengklasifikasian data

**2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
- b. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
- c. Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

**3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
- b. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

**4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyusun dan penerbitan naskah sumber arsip
- b. Penyediaan sarana layanan informasi arsip

**5) Program Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)** dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a. Pembuatan database arsip daerah dari SKPD/Instansi Pemerintah.

## **25. Komunikasi dan Informatika**

Tekanan arah kebijaksanaan dalam urusan ini antara lain peningkatan kerja sama antara pemerintah, media massa dan masyarakat dalam menjaga keberadaan informasi pembangunan yang bertanggung jawab dengan program program:

**1) Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
- b. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi\*)
- c. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi
- d. Meningkatkan jumlah press relise

**2) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi;
- b. Meningkatkan pelaksanaan talk show tentang pembangunan daerah

**3) Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

**4) Program Kerjasama informasi dan media massa,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah\*)
- b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
- c. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
- d. Meningkatkan program siaran pembangunan

**5) Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Koordinasi kehumasan daerah Kabupaten .
- b. Koordinasi bidang komunikasi dan informasi antar lintas SKPD, lintas instansi vertikal di daerah, BUMD, dan swasta lokal di Kabupaten.

**6) Program peningkatan kapasitas SDM aparatur pada SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informasi di daerah,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Lokakarya aparatur kehumasan Kabupaten Sragen dalam rangka publikasi kebijakan strategi pemerintah;
- b. Asistensi bimbingan teknis bidang manajemen komunikasi public;
- c. Asistensi bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik

**7) Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika daerah,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyusunan standar dokumentasi dan publikasi isu-isu strategis daerah;
- b. Penyusunan standar kompetensi bidang kehumasan.

## **26. Perpustakaan**

Tekanan arah kebijakan dalam urusan ini antara lain meningkatkan minat baca bagi masyarakat khususnya kelompok umur yang produktif melalui program-program:

**1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
- b. Pengembangan minat dan budaya baca

**2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Pustaka,**

dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pendataan karya cetak dan karya rekam;
- b. Serah dan simpan karya cetak dan karya rekam

**B. Urusan Pilihan**

**1. Pertanian**

Tekanan arah kebijakan di urusan ini antara lain pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan dan sistem agribisnis yang dinamis melalui program-program sebagai berikut.

**1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani,\*\*) dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.**

- a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
- b. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
- c. Peningkatan kemampuan lembaga petani

**2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.**

- a. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- b. Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer
- c. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil pertanian/perkebunan masyarakat

**3) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan,\*\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian /perkebunan tepat guna
- b. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna
- c. Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna
- d. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian perkebunan tepat guna

**4) Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian /perkebunan
- b. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
- c. Penyuluh dan pendamping bagi pertanian /perkebunan

**5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian /perkebunan
- b. Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan
- c. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

**6) Program Pencegahan dan Penanggulangan hama dan Penyakit pertanian /ternak/perkebunan\*\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pendataan masalah peternakan
- b. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

- c. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

**7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan,**

dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
- b. Pembibitan dan perawatan ternak
- c. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
- d. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
- e. Penanaman hijauan pakan ternak dan pengadaan air untuk ternak
- f. Penyediaan induk/bibit ternak

**8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan,**

dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna\*)
- b. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna\*)
- c. Pemeliharaan rutin/barkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna\*)

**9) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
- b. Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer
- c. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

- 10) Program pengembangan jaringan irigasi,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.
- a. Rehabilitasi jaringan irigasi ditingkat usahatani
  - b. Rehabilitasi jaringan irigasi desa
  - c. Pengembangan irigasi partisipatif
- 11) Program Pengembangan pertanian organik,\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.
- a. Pengembangan rumah kompos\*)
  - b. Pengadaan soil test kit
  - c. Pelatihan untuk petugas dan petani
- 12) Program peningkatan kapasitas kelembagaan petani,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.
- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pos penyuluhan desa (Posluhdes), Balai penyuluhan dan badan pelaksana penyuluhan (Bapeluh).
  - b. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan).\*)
- 13) Program penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.
- a. Fasilitasi pelatihan dan penyediaan alsin hand traktor
  - b. Penyediaan pompa air, cultivator, hand sprayer, power sprayer.
  - c. Penyediaan alat pasca panen: terpal, pedal thresher.
- 14) Program pelebagaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan peternakan dan perikanan,** dengan indikasi kegiatan antara lain:

- a. Pengiriman wanita tani pada kursus-kursus pemberdayaan dalam rangka memperbaiki produktivitas kinerja kelompok wanita tani di pedesaan

**15) Program peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan,** dengan indikasi kegiatan antara lain:

- a. Pengembangan kawasan buah
- b. Fasilitasi pembinaan kawasan

**16) Program pemberdayaan petani pengembangan kawasan hortikultura, \*)**dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan SLPHT bidang hortikultura
- b. Pelaksanaan Heresgrestasi lahan hortikultura

**17) Program peningkatan produksi dan pendapatan petani bidang hortikultura,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pelatihan manajemen pengolahan dan pemasaran hasil
- b. Pelatihan sertifikasi produksi bidang hortikultura

**18) Program peningkatan ketahanan pangan termasuk asal ternak,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan pompa hidran
- b. Pembuatan kompos dari sisa hasil panen padi jerami

**19) Program Pengembangan Agribisnis dan agroindustri Peternakan dan perikanan** dengan kegiatan antara lain :

- a. Meningkatkan populasi sapi potong rata-rata 3 % pertahun
- b. Meningkatnya populasi ternak kambing rata-rata 3% pertahun

## **2. Kehutanan**

Tekanan arah kebijakan dalam urusan ini antara lain pemantapan dan pelestarian sumber daya hutan dengan program-program sebagai berikut.

**1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi
- b. Pengembangan hutan tanaman
- c. Pengembangan hasil hutan non kayu
- d. Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan
- e. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

**2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, \*\*)dengan** indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- b. Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
- c. Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- d. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

**3) Program Pelayanan Publik Urusan Kehutanan,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan kayu
- b. Pelayanan pemberian ijin tebang dan ijin angkut kayu rakyat/milik pribadi

**4) Program pengembangan Sistem Informasi Geografi Kehutanan,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pembuatan peta-peta tematik kehutanan secara digital
- b. Penyusunan data dan statistik kehutanan

**5) Program Pemanfaatan Kawasan Hutan kemasyarakatan,\*\*) dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.**

- a. Pertanian tanaman palawija, padi gogorancanah;

**6) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.**

- a. Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan;
- b. Pembuatan bibit /benih tanaman kehutanan;
- c. Penanaman pohon pada kawasan hutan produksi dan hutan wisata;
- d. Pemeliharaan kawasan hutan produksi dan hutan wisata.

**7) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.**

- a. Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan;
- b. Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan.

**8) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.**

- a. Pengembangan hutan masyarakat adat;
- b. Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat ;
- c. Perencanaan RHL.

**9) Program Pengendalian Kebakaran Hutan, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.**

- a. Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan;
- b. Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan;
- c. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan.

### **3. Energi dan Sumber Daya Mineral**

Tekanan arah kebijaksanaan urusan ini antara lain meningkatkan pembinaan dan penertiban penambang melalui program-program:

**1) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C;
- b. Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C;
- c. Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C.

**2) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
- b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan rakyat
- c. Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi

**3) Program peningkatan pelayanan usaha pertambangan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pembinaan dan pengawasan usaha di minyak dan gas hulu dan hilir

**4) Program peningkatan regulasi energi sumber daya dan mineral,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Regulasi pertambangan umum

**5) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengembangan energi alternative;
- b. Pembinaan dan pengembangan tenaga listrik pedesaan;
- c. Inventarisasi jaringan listrik pedesaan.

**6) Program pengelolaan dan pengembangan potensi dan teknologi geologi,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pembangunan sumur bor di daerah rawan kekeringan;
- b. Pembangunan sumur pantau dan ABT;
- c. Pemetaan cekungan air tanah (CAT).

#### **4. Pariwisata**

Tekanan utama dari arah kebijakan urusan ini antara lain mengembangkan kelembagaan pendukung pembangunan pariwisata melalui program-program sebagai berikut.

**1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Analisis pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata;
- b. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.

**2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pengembangan objek pariwisata unggulan;
- b. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

**3) Program Pengembangan Kemitraan,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pengembangan dan penguatan informasi dan database;
- b. Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata.

**4) Program Peningkatan layanan wisata** , dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelatihan kepada para pemandu wisata;
- b. Studi banding tentang layanan wisata ke daerah lain.

## **5. Perikanan**

Tekanan arah kebijakan dalam urusan ini adalah meningkatkan produksi perikanan agar dapat mencapai target setiap tahunnya.

**1) Program pengembangan budidaya perikanan,\*\*)** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pengembangan bibit ikan unggul;
- b. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan;
- c. Pembinaan dan pengembangan perikanan.

**2) Program pengembangan perikanan tangkap,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap;
- b. Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap;
- c. Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap.

**3) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Kajian sistem penyuluhan perikanan;
- b. Penyuluhan penerapan teknologi tepat guna perikanan.

**4) Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;

## **6. Perdagangan**

Tekanan arah kebijakan urusan ini adalah meningkatkan kegiatan perdagangan dan penataan pedagang ekonomi lemah.

**1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan,\*\*)** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen;
- b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen;
- c. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa;
- d. Pembinaan peredaran barang kena cukai.

**2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor,** dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut.

- a. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industry;
- b. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan dalam negeri.

**3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional;
- b. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha.

**4) Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan,\*)** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan; \*)
- b. Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan.\*)

## **10.Perindustrian**

Tekanan utama dalam arah kebijakan ini antara lain mengembangkan strategi pemasaran dan daya saing produk industri.

### **1) Program Peningkatan Koperasi, Iptek dan sistem produksi,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi;
- b. Pelayanan pengembangan modal ventura dan inkubator;
- c. Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi.

### **2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya;
- b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industry.

### **3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Pembinaan kemampuan teknologi industri;
- b. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri;
- c. Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur.

### **4) Program Penataan Struktur Industri,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir;
- b. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industry;
- c. Pembinaan keterkaitan produk hulu hilir.

### **5) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial;
- b. penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat.

## **11. Transmigrasi**

Tekanan arah kebijakan urusan ini adalah meningkatkan kelembagaan dan mempersiapkan sumber daya manusia transmigran.

**1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut.

- a. Penguatan SDM Pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan
- b. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

**2) Program Transmigrasi Regional,** dengan indikasi kegiatan antara sebagai berikut.

- a. Penyuluhan transmigrasi regional
- b. Pelatihan transmigrasi regional

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara sasaran, arah kebijakan, indikator kinerja dan program-program pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

### 7.3. Matriks Hubungan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan di Kabupaten Sragen dalam tahun 2011-2016

#### KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

##### A.PROGRAM YANG DILAKSANAKAN OLEH SEMUA SKPD

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
1.	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan administrasi kantor	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Pelayanan administrasi perkantoran lancar			Program Penyediaan Administrasi Perkantoran
2.	Meningkatnya kinerja operasional aparatur	Penyediaan dukungan sarana dan prasarana operasional aparatur yang memadai	Pelayanan dukungan operasional aparatur lancar			1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

### 7.3. Matriks Hubungan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan di Kabupaten Sragen dalam tahun 2011-2016

#### KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

##### A.URUSAN WAJIB

##### 1. URUSAN PENDIDIKAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD utama
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meratanya kesempatan memperoleh pendidikan anak usia dini	Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan anak usia dini	Jumlah dan distribusi sekolah pendidikan anak usia dini pada 20 kecamatan	155 sekolah	160 sekolah yang tersebar pada 20 kecamatan	Pendidikan anak usia dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.	Tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	APK SMP/MTs	132,87%	134,667%	Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah	Peningkatan kualitas pendidikan menengah keatas	APK SMA / SMK / MA	83%	86,34%	Pendidikan menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.	Berdayanya lembaga pendidikan non formal	Pemberdayaan lembaga pendidikan non formal	Jumlah pendidikan non formal	67 lembaga	80 lembaga	Pendidikan non formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan luar biasa	Peningkatan kualitas pendidikan luar biasa	Berkembangnya forum masyarakat peduli bangsa	5	8	Pendidikan luar biasa	Pendidikan	Dinas Pendidikan
6.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan	Rata – rata lama sekolah Indikator tenaga pendidik	6 tahun	12 tahun	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD utama
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
7.	Meningkatnya manajemen pendidikan	Peningkatan pelayanan pendidikan	Penerapan sistem informasi manajemen pendidikan	3	6	Manajemen pelayanan pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
8.	Meningkatnya pembinaan menuju karakter bangsa	Pembinaan menuju karakter bangsa	Tumbuhnya jiwa nasionalisme	2	4	Program pendidikan berkelanjutan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
9.	Meningkatnya pembinaan pendidikan non formal	Peningkatan pendidikan non formal	Jumlah tempat kursus meningkat	36 lembaga	58 lembaga	Program pendidikan non formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
10.	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan	Peningkatan sarana pendidikan	Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan	terprogram	regulasi	Program aksi pendidikan murah dan bermutu	Pendidikan	Dinas Pendidikan
11.	Meningkatnya pengarusutamaan gender bidang pendidikan	Peningkatan peran gender dalam bidang pendidikan	Jumlah pengarusutamaan gender meningkat	40%	60%	Program peningkatan peran serta anak dan kesejahteraan gender dalam pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan  Bag Pemberdayaan perempuan Setda Kabupaten

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 2. URUSAN KESEHATAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Terjaminnya ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan	Ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Cukup	Sangat cukup dan terdistribusi lancar	Program obat dan perbekalan kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.	Menumbuhkan gaya hidup sehat keluarga dan masyarakat	Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan gaya hidup sehat	Revitalisasi kesehatan masyarakat dan desa siaga	Sudah berjalan	Adanya regulasi kesehatan masyarakat	Program upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.	Terjaminnya keselamatan ibu melahirkan dan anak	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	AKB ( /1000 KH ) AKI (/1000 KH)	3,7 0	5,8 0	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD
4.	Meningkatkan status gizi keluarga dan masyarakat	Peningkatan perbaikan status gizi keluarga dan masyarakat	Prevalensi gizi buruk	0,1%	0	Program perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
5.	Memberdayakan masyarakat dalam menangani kesehatan	Peningkatan penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah posyandu	1559 unit	1570 unit (paripurna)	Program peningkatan penyuluhan dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
6.	Meningkatnya kualitas SDM di bidang kesehatan	Peningkatan dan pemerataan baik kualitas maupun kuantitas pelayanan kesehatan	Tenaga kesehatan	nominal	terprogram	Program peningkatan kualitas SDM dan pelayanan kesehatan anak balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan
7.	Meningkatnya lingkungan sehat	Peningkatan lingkungan sehat	Demplot lingkungan sehat	8	12	Program pengembangan lingkungan sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
8.	Menurunnya kasus penyakit menular	Penurunan kasus penyakit menular	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TB Paru</li> <li>- DBD</li> <li>- Kusta</li> <li>- AI</li> <li>- HIV/AIDS</li> </ul>	70 kasus 100 kasus 100 kasus 32 kasus 39 kasus	70 kasus 100 kasus 100 kasus 15 kasus 200 kasus	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit	Kesehatan	Dinas Kesehatan
9.	Meningkatkan kesehatan penduduk miskin	Adanya standarisasi pelayanan kesehatan penduduk miskin	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan	Belum	Sudah disusun	Program standarisasi pelayanan kesehatan penduduk miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD
10.	Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin	Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin	Menurunnya penduduk miskin	17,58%	15,25%	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan
11.	Meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan	Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan	Semakin tersedianya pelayanan kesehatan	50,36 per 100.000 penduduk	21,45 per 100.000 penduduk	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
12.	Meningkatnya sarana	Peningkatan dan perbaikan	Tercukupinya	Terprograc	Meningkat	Program	Kesehatan	Dinas

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	dan prasarana kesehatan di puskesmas	sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	sarana Prasarana kesehatan di puskesmas	cukup	Jumlah meningkat	peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya		Kesehatan
13.	Meningkatnya sarana dan prasarana di Rumah Sakit	Peningkatan sarana dan prasarana di Rumah Sakit	- Pembangunan gudang obat - Pembangunan ruang rawat	Terprogram  Terprogram	Meningkat  Meningkat	Program pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit	Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD
14.	Meningkatnya pengawasan Obat dan makanan	Peningkatan pengawasan obat dan makanan	-Lancarnya distribusi Obat dan makanan	12 kali	20 kali	Program pengawasan obat dan makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
15.	Mengoptimalkannya sumber daya tenaga kesehatan	Pendayagunaan SDM tenaga kesehatan	Kinerja dan kedisiplinannya meningkat	Kinerja jalan	Meningkatnya kinerja	Program peningkatan kapasitas SDA	Kesehatan	Dinas Kesehatan
16	Ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit	Terpenuhinya biaya operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit	Terpenuhinya dana operasional puskesmas dan RSUD	Terprogram	Meningkat	Program peningkatan sarana dan prasarana RS	Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD
17.	Meningkatnya pembinaan, pengawasan peredaran obat	Peningkatan pengawasan peredaran obat	Pengawasan obat dan makanan	10 kali	20 kali	Program kefarmasian dan alat kesehatan dan makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
18.	Meningkatkan manajemen kesehatan	Peningkatan manajemen kesehatan	Peningkatan kualitas pendidikan kesehatan	10	15	Program sumber daya kesehatan dan manajemen kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
19.	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang murah	Peningkatan pelayanan kesehatan yang murah	Jaminan kesehatan masyarakat	Terprogram	Regulasi	Program aksi kesehatan murah dan berkualitas	Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD
20.	Meningkatnya standar pelayanan minimal kepada masyarakat	Peningkatan standar pelayanan minimal kepada msyarakat	Semakin meningkatnya standar Pelayanan masyarakat	Ada pelayanan	Semakin baik pelayanan	Program upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan	RSUD
21.	Meningkatnya pelayanan Kesehatan kepada masyarakat	Peningkatan upaya pelayanan kesehatan kepada Masyarakat	Semakin meningkatnya promosi Pelayanan kepada masyarakat	terprogram	meningkat	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD
22.	Mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Peningkatan upaya pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	terprogram	Regulasi	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kesehatan	RSUD
23.	Mengembangkan standarisasi pelayanan masyarakat	Tersusunnya standarisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Evaluasi dan pengembangan standar	1 kali	3 kali	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Kesehatan	RSUD
24.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengobati penduduk miskin	Peningkatan optimalisasi Pelayanan kesehatan	Lancarnya pelayanan kesehatan kepada penduduk miskin	berjalan	Sangat lancar	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Kesehatan	RSUD
25.	Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Peningkatan upaya pelayanan kesehatan secara profesional dan berkualitas	Lancarnya pemeliharaan rutin berbagai peralatan medis	Peralatan cukup	meningkat	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah	Kesehatan	RSUD

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
						sakit/rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		
26.	Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Semakin meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	cukup	Sangat memadai	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit /rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru rumah sakit mata	Kesehatan	RSUD

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meningkatkan infrastruktur perkotaan	Peningkatan infrastruktur perkotaan	Pemantapan Sragen Asri	Terprogram	Meningkat terus	Program aksi pembangunan infrastruktur perkotaan	Cipta Karya	DPU, BAPPEDA
2.	Meningkatnya pembangunan	Peningkatan pembangunan saluran drainase	Pembangunan saluran	23	30	Program pembangunan	Cipta Karya	DPU

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	saluran drainase		drainase			saluran drainase		
3.	Mewujudkan kondisi wilayah yang lebih hijau	Terwujudnya wilayah yang lebih hijau	Terarahnya pembangunan daerah sesuai RTRW	Terprogram	Regulasi	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Cipta Karya	DPU, BAPPEDA
4.	Meningkatkan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan jalan	Terprogram	Regulasi	Program pembangunan jalan dan jembatan	Cipta Karya	DPU
5.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan jalan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan jalan	Meningkatnya kualitas jalan baik	83,45%	90%%	Program peningkatan Jalan dan Jembatan	Bina Marga	DPU
6.	Meningkatnya pembangunan talud / bronjong	Peningkatkan pembangunan talud / bronjong	Pembangunan turap / talud	35	50	Program pembangunan dan pemeliharaan turop / tolud / brojong	Bina Marga	DPU
7.	Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatkan pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemeliharaan jalan dan jembatan	75 tempat	90 tempat	Program pemeliharaan jalan dan jembatan	Bina Marga	DPU
8.	Meningkatnya inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Peningkatkan inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Panjang jalan	992,20 km	998,40 km	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Bina Marga	DPU
9.	Meningkatnya tanggap darurat jalan dan jembatan	Peningkatan tanggap darurat jalan dan jembatan	Panjang jalan dan jembatan	terprogram	Meningkat	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Bina Marga	DPU
10.	Meningkatnya pembangunan system informasi / data base jalan dan	Peningkatkan pembangunan system informasi / data base jalan dan jembatan	Kondisi tanggap darurat	10	15	Program pembangunan system informasi	Bina Marga	DPU

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	jembatan							
11.	Meningkatnya sarana dan prasarana kebina margaan	Peningkatkan sarana dan prasarana kebina margaan	Pemeliharaan alat – alat berat	6	8	Program peningkatan sarana dan prasarana kebina margaan	Bina Marga	DPU
12.	Meningkatkan sarana-prasarana ekonomi daerah di pedesaan	Peningkatan sarana –prasarana ekonomi daerah di pedesaan	-Semakin lancarnya perekonomian daerah	terprogram	Meningkat	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Bina Marga	DPU
13.	Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi	Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi	Pemeliharaan jaringan irigasi	10	16	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	Pengairan	DPU
14.	Tersedianya pengelolaan air baku	Penyediaan dan pengelolaan air baku	Pembangunan sumur air tanah	8 unit	12 unit	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Pengairan	DPU
15.	Meningkatnya konversi sungai danau dan sumber daya air	Peningkatan konversi sungai danau dan sumber daya air	Pembangunan embung	3	9	Program pengembangan konversi sungai, danau dan sumber daya air	Pengairan	DPU
16.	Mengembangkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Berkembangnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pembinaan teknik pengolahan air limbah	5	9	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pengairan	DPU
17.	Mengendalikan bahaya banjir	Pengendalian banjir	Reservoir pengendalian banjir	4	6	Program pengendalian banjir	Pengairan	DPU
18.	Meningkatkan	Peningkatan kualitas	Meningkatnya	terprogram	Regulasi	Pengaturan jasa	Sekretariat	DPU

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	kualitas jasa konstruksi	Jasa konstruksi	kualitas jalan			konstruksi		

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meningkatnya pengembangan perumahan	Tercukupinya kebutuhan perumahan	Pengembangan sarana dan prasarana rumah sederhana	683	800	Program pengembangan perumahan	Perumahan	DPU, BAPPEDA
2.	Terwujudnya lingkungan yang sehat	Mewujudkan lingkungan yang sehat	- Pengawasan kualitas lingkungan yang sehat - Pelayanan air bersih	28 unit  16 %	56 unit  26 %	Program lingkungan sehat	Perumahan	DPU, BAPPEDA
3.	Meningkatnya penataan perumahan	Peningkatan penataan perumahan	Stimulasi rehabilitasi rumah	85 unit	112 unit	Program perbaikan dan penataan perumahan	Perumahan	DPU
4.	Meningkatnya pengelolaan areal	Peningkatan pengelolaan areal pemakaman	Penataan areal pemakaman	5 unit	18 unit	Program pengelolaan areal	Perumahan	DPU

	pemakaman					pemakaman		
5.	Meningkatkan ketrampilan SDM dalam menangani bahaya kebakaran	Peningkatan ketrampilan SDM dalam Menangani bahaya kebakaran	Diberikan diklat	3 kali	7 kali	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Perumahan	DPU

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 5. URUSAN PENATAAN RUANG

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meningkatnya perencanaan tata ruang	Perencanaan tata ruang	Penetapan kebijakan RTRK	6 kecamatan	9 kecamatan	Program perencanaan tata ruang	Tata Ruang	BAPPEDA
2.	Meningkatnya pemanfaatan ruang	Peningkatan pemanfaatan ruang	Standar dan kriteria pemanfaatan ruang	Terprogram	Regulasi	Program pemanfaatan ruang	Tata Ruang	BAPPEDA
3.	Terkendalinya pemanfaatan ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang	Pengawasan pemanfaatan ruang	Terprogram	Regulasi	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Tata Ruang	BAPPEDA
4.	Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau	Pengelolaan ruang terbuka hijau	Penataan ruang terbuka hijau	4 unit	6 unit	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Tata Ruang	BAPPEDA, BLH

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Menata pengembangan data	Pengembangan data	Penyusunan data penunjang perencanaan pembangunan	2 kegiatan	4 kegiatan	Program pengembangan data / informasi	Perencanaan	BAPPEDA
2.	Meningkatnya kerjasama pembangunan	Meningkatkan kerjasama pembangunan	Kerjasama pembangunan antar daerah	2 kegiatan	4 kegiatan	Program kerjasama pembangunan	Perencanaan	BAPPEDA
3.	Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan	Meningkatkan pengembangan wilayah perbatasan	Penetapan rencana tata ruang perbatasan	1 kegiatan	5 kegiatan	Program pengembangan wilayah perbatasan	Perencanaan	BAPPEDA
4.	Berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh	Meningkatkan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Penetapan rencana tata ruang wilayah strategis	1	2	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Perencanaan	BAPPEDA
5.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Bintek perencanaan pembangunan daerah	1 program	2 program	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan	BAPPEDA
6.	Meningkatnya perencanaan pembangunan ekonomi	Peningkatan perencanaan pembangunan ekonomi	Penyusunan laporan kinerja pemda	2 jenis	4 jenis	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Perencanaan	BAPPEDA

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
7.	Meningkatnya perencanaan sosial dan budaya	Peningkatkan perencanaan sosial dan budaya	Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	2 kali	6 kali	Program perencanaan sosial dan budaya	Perencanaan	BAPPEDA
8.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku	2 semester	triwulan	Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan	BAPPEDA, SETDA (Bag. Pembangunan)
9.	Meningkatnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Peningkatan perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah	1 kali	Meningkat	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Perencanaan	BAPPEDA
10.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Penyusunan masterplan rawan bencana alam	1 kali	Regulasi	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Perencanaan	BAPPEDA
11.	Meningkatkan optimalisasi rembung warga	Meningkatnya peran serta warga dalam pembangunan	Perencanaan partisipatif	2 kali	4 kali	Program aksi sinergitas pembangunan	Perencanaan	BAPPEDA, BKBPM

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 7. URUSAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meningkatnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Peningkatan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Penambahan prasarana perhubungan	terprogram	Meningkat	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Perhubungan Darat	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
2.	Menciptakan manajemen transportasi yang handal	Tersedianya prasarana transportasi	Perlengkapan prasarana jembatan timbang	Terprogram	Regulasi	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Perhubungan Darat	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
3.	Meningkatnya pelayanan angkutan	Peningkatan pelayanan angkutan	Temu wicara dengan pengelola angkutan umum	4 kali	8 kali	Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan Darat	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
4.	Meningkatnya pengamanan lalu lintas	Terciptanya pengamanan lalu lintas	Pembangunan jembatan penyeberangan jalan	4	6	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan Darat	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
5.	Menyediakan uji kendaraan bermotor bagi masyarakat	Inovasi pelayanan bidang pengujian kendaraan bermotor yang akuntabel dan bisa dipercaya	Pelaksanaan uji kendaraan bermotor	6 kali	10 kali	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Perhubungan Darat	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Kajian dampak lingkungan	4 kali	10 kali	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Lingkungan Hidup	BLH
2.	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi	4 kali	6 kali	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Lingkungan Hidup	BLH
3.	Meningkatnya rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Peningkatan rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Rehabilitasi hutan dan lahan	30	40	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Lingkungan Hidup	BLH
4.	Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH	Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	6	10	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	Lingkungan Hidup	BLH
5.	Meningkatkan pengendalian polusi	Peningkatan pengendalian polusi	Pengujian emisi kendaraan bermotor	10	12	Program peningkatan pengendalian polusi	Lingkungan Hidup	BLH
6.	Mengembangkan ekowisata dan jasa lingkungan	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan	Pengembangan ekowisata di kawasan konservasi	2 kali	4 kali	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan	Lingkungan Hidup	BLH

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
7.	Meningkatkan kinerja Petugas pengangkut sampah	Peningkatan kinerja Petugas pengangkut sampah	Pengangkutan sampah berjalan lancar	terprogram	regulasi	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup	BLH
8.	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan	Pemantapan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan	Tercapainya target PAD	2 kali	4 kali	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Lingkungan Hidup	BLH
9.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berolah raga	Peningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga	Tersedianya pemeliharaan gedung olahraga yang nyaman	4 unit	8 unit	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Lingkungan Hidup	BLH
10.	Memasang LPJU di 20 kecamatan	Terpasang dan terpeliharanya LPJU di 20 kecamatan	Terwujudnya pemasangan dan pemeliharaan LPJU di 20 kecamatan	6 unit	10 unit	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Lingkungan Hidup	BLH
11.	Meningkatkan pembangunan limbah tinja untuk bahan bakar	Pembangunan dan pemanfaatan limbah tinja untuk bahan bakar	Terbangunnya tempat pembuangan limbah tinja	2 unit	4 unit	Program Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	Lingkungan Hidup	BLH

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 9. URUSAN PERTANAHAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meningkatnya pembangunan sistem pendaftaran tanah	Pembangunan sistem pendaftaran tanah	Regulasi system pendaftaran tanah	Terprogram	Regulasi	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Pertanahan	Bag.Pemerintahan dan Pertanahan Setda
2.	Meningkatnya penataan pemilikan tanah	Peningkatan penataan pemilikan tanah	-Penyuluhan hukum pertanahan -Program proha	12 kali  586 bidang	14 kali  700 bidang	Program penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pertanahan	Bag.Pemerintahan dan Pertanahan Setda
3.	Menyelesaikan dengan cepat bila ada konflik – konflik pertanahan	Terselesaikannya konflik – konflik pertanahan	Ada konflik – konflik pertanahan	Segera diselesaikan	Tidak ada konflik pertanahan	Program penyelesaian konflik – konflik pertanahan	Pertanahan	Bag.Pemerintahan dan Pertanahan Setda

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Menata administrasi kependudukan dengan baik	Tertatanya administrasi kependudukan	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	Cukup	SDM terampil dan professional	Program penataan administrasi kependudukan	Kependudukan	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
2.	Meningkatnya kualitas sistem informasi data keluarga miskin	Peningkatan kualitas sistem informasi data keluarga miskin	Penelitian model pengentasan kemiskinan	2 kali	Lanjutan sampai aktian	Program peningkatan kualitas system informasi data keluarga miskin	Kependudukan	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
3.	Meningkatnya akses penduduk miskin terhadap kepemilikan KTP	Pembuatan KTP gratis bagi penduduk miskin	Meningkatnya kepemilikan KTP	70%	90 %	Program KTP bagi penduduk miskin	Catatan Sipil	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
4.	Meningkatnya SDM yang menangani kependudukan	Peningkatan SDM yang menangani kependudukan	Pelatihan registrasi bagi pamong desa	3 kali	4 kali dengan pendampingan	Program peningkatan SDM yang menangani kependudukan	Kependudukan	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meningkatnya kualitas anak dan perempuan	Peningkatan kualitas anak dan perempuan	Kesetaraan gender dan perlindungan anak	7 kali	7 kali	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Bag. PP & PA Setda
2.	Meningkatnya penguatan	Penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan	Pemberdayaan perempuan	6 obyek	8 obyek	Program penguatan	Pemberdayaan Perempuan &	Bag. PP & PA Setda

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	anak	dan anak			kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Perlindungan Anak	
3.	Meningkatnya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Penyusunan profil perlindungan perempuan dan lansi dan cacat	Terprogram	Regulasi	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Bag. PP & PA Setda
4.	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pelatihan kesetaraan gender	8 kali	8 kali	Program peningkatan peran serta gender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Bag. PP & PA Setda
5.	Meningkatnya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Pengumpulan data / bahan pembentukan tumbuh kembang anak	6 kali	12 kali	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Perlindungan Anak	BKB PMD, Bag. PP & PA Setda

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meningkatnya program KB	Peningkatan program KB	Pengadaan sarana mobilitas dan KB keliling	10	14	Program KB	Keluarga Berencana	BKBPM
2.	Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	Peningkatan kesehatan reproduksi remaja	Sosialisasi KRR	890	896	Program kesehatan Reproduksi remaja	Keluarga Berencana	BKBPM
3.	Meningkatnya pelayanan kontrasepsi	Peningkatan pelayanan kontrasepsi	Pelayanan KB medis operasi	165	230	Program pelayanan kontrasepsi	Keluarga Berencana	BKBPM
4.	Meningkatnya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri	Peningkatan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri	Pembentukan kelompok peduli masyarakat peduli KB mandiri	4	8	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri	Keluarga Berencana	BKBPM
5.	Meningkatnya promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Peningkatan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Penyuluhan KIA kepada kelompok sasaran	12 kali	16 kali	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Keluarga Berencana	BKBPM
6.	Meningkatnya Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Pendirian pusat layanan konseling KRR	1 tempat	4 tempat	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Keluarga Berencana	BKBPM

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
7.	Meningkatnya penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	6 kali	12 kali	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	Keluarga Berencana	BKBPMMD
9.	Meningkatnya Pengembangan model operasional BKB-posyandu-padu	Pengembangan model operasional BKB-posyandu-padu	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-posyandu-padu	Terprogram	Regulasi	Program pengembangan model operasional BKB-posyandu-padu	Keluarga Berencana	BKBPMMD
10.	Meningkatnya Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Pendampingan kelompok bina keluarga	6	15	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Keluarga Sejahtera	BKBPMMD

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 13. URUSAN SOSIAL

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Memberdayakan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang	Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah	50i	100	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS	Sosial	Dinsos

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		kesejahteraan sosial					
2.	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center	50%	100%	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Sosial	Dinsos
3.	Meningkatnya pembinaan panti asuhan/panti jompo	Pembinaan panti asuhan/panti jompo	Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik	3 kali	6 kali	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Sosial	Dinsos
4.	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Terberdayanya kelembagaan kesejahteraan sosial	Pemberdayaan karang taruna	50%	100%	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Sosial	Dinsos
5.	Meningkatkan pembinaan penyakit masyarakat	pembinaan tenaga yang mengelola penyakit masyarakat	Terbinanya dan teratasinya para penyakit sosial seperti gelandangan dan PSK	50	300	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)	Sosial	Dinsos
6.	Meningkatkan Pembina	pembinaan anak terlantar	Meningkatnya frekuensi	60	200	Program pembinaan anak	Sosial	Dinsos

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	an anak terlantar		pembinaan			terlantar		
7.	Membina para penyandang cacat dan trauma	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma		335	675	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Sosial	Dinsos
8.	Meningkatkan pencegahan dini penanggulangan bencana alam	peningkatan upaya pencegahan dini penanggulangan bencana alam	Pencegahan dan kesiapan bila ada bencana alam	160	400	Program pencegahan dini penanggulangan bencana alam	Sosial	Dinsos
9.	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatny a jumlah bantuan korban bencana	50%	100%	Program perlindungan dan jaminan sosial	Sosial	Dinsos
10.	Meningkatkan kesejahteraan sosial para pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial	Peningkatan jumlah para pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial	Meningkatny a jumlah para pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang mengikuti penyuluhan sosial	terprogram	regulasi	Program pengembangan kesejahteraan sosial	Sosial	Dinsos
5.	Terberdayanya peningkatan kesejahteraan penduduk usia lanjut	Pemberdayaan kesejahteraan penduduk usia lanjut	Pembinaan kepada pddk usia lanjut yang tidak mampu di luar panti	3 kali	6 kali	Program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penduduk usia lanjut	Sosial	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 14. URUSAN KETENAGAKERJAAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	6 kali	12 kali	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
2.	Meningkatnya kesempatan kerja	Peningkatan kesempatan kerja	- Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja - Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	terprogram	meningkat	Program peningkatan kesempatan kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
3.	Meningkatkan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan	Perlindungan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	2 unit	6 unit	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
4.	Meningkatkan Pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja	Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	Akreditasi lembaga pelatihan	12 buah	16 buah	Program pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Menciptakan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Berupaya dalam penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Fasilitasi dan advokasi KUMKM, LKM dan IKM	3 tempat	15 tempat	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Usaha Kecil & Menengah	DISPERINKOP & UMKM
2.	Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Pelatihan SDM dan kewirausahaan manajemen dan kemitraan	4 kali	15 kali	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Usaha Kecil & Menengah	DISPERINKOP & UMKM
3.	Meningkatnya sistem mendukung bagi usaha mikro kecil menengah	Pengembangan sistem mendukung bagi usaha mikro kecil menengah	Peningkatan jaringan kerja sama antar lembaga tentang promosi produk	4 lembaga	15 lembaga	Program pengembangan system pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah	Usaha Kecil & Menengah	DISPERINKOP & UMKM
4.	Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Sosialisasi prinsip – prinsip dan dasar hokum KUMKM, LKM dan IKM	6 kali	15 kali	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi	DISPERINKOP & UMKM

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
5.	Mengembangkan inovasi teknologi industri	Pengembangan inovasi teknologi industri	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	2 unit	4 unit	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Usaha Kecil & Menengah	DISPERINKOP & UMKM
6.	Memfasilitasi pengembangan teknologi industri kecil dan menengah	Pengembangan industri kecil dan menengah	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	4 unit	6 unit	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Usaha Kecil & Menengah	DISPERINKOP & UMKM
7.	Mensosialisasikan program industri kecil kepada Para industriawan	Pengembangan industri kecil bagi industriawan	Pembinaan kemampuan teknologi industri	4 kali	8 kali	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Usaha Kecil & Menengah	DISPERINKOP & UMKM
8.	Pengembangan sarana dan prasarana yang layak	Berkembangnya sarana dan prasarana inovasi industri	Pengadaan sarana dan media untuk masyarakat	terprogram	meningkat	Program pengembangan sentra-sentra industry potensial	Usaha Kecil & Menengah	DISPERINKOP & UMKM

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 16. URUSAN PENANAMAN MODAL

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			

1.	Meningkatkan promosi dan kerja sama industri	Peningkatan promosi dan kerja sama investasi	Penyelenggaraan pameran investasi	1 kali	2 kali	Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi	Penanaman Modal	Badan PUMD
2.	Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Penyusunan masterplan pengembangan penanaman modal	1 kali	Regulasi masterplan	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Penanaman Modal	Badan PUMD
3.	Menyiapkan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah	Penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	1 kali	Regulasi potensi investasi	Program penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah	Penanaman Modal	Badan PUMD

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 17. URUSAN KEBUDAYAAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Melestarikan dan mengembangkan serta mendayagunakan seni dan budaya lokal	Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal tradisional	Terwujudnya pengelolaan dan pelestarian adat budaya daerah	2 kali	3 kali	Program pengembangan nilai budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga
2.	Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan perilaku masyarakat dengan mengedepankan nilai kekayaan budaya lokal	Meningkatnya pengembangan seni budaya melalui event-event pariwisata	- Pengembangan kesenian dan budaya daerah - Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	2 kali  1 kali	3 kali  3 kali	Program pengelolaan keragaman budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga
3.	Meningkatnya akses dan kualitas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Pembinaan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Inventarisasi data organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	5 kecamatan	20 kecamatan	Program pembinaan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Kebudayaan	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga  Badan kesatuan bangsa Politik dan perlindungan masyarakat

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 18. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Mewujudkan generasi muda yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berwawasan kebangsaan, disiplin, bertanggungjawab dan berbudi pekerti luhur serta tanggap terhadap permasalahan, lingkungan dan pembangunan	Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan	a. Pembinaan organisasi kepemudaan b. Fasilitasi aksi bakti kepemudaan c. Penyuluhan pencegahan narkoba di kalangan generasi muda	5 kecamatan  1 kali  5 kecamatan	28 kecamatan  3 kali  20 kecamatan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kepemudaan	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga
2.	Mengembangkan sentra-sentra pemuda produktif	Pengembangan kegiatan ekonomi produktif di kalangan pemuda	- Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda - Pembinaan kelompok usaha pemuda pelopor (KUPP)	3 kali  3 kelompok	5 kali  5 kelompok	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Kepemudaan	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga
3.	Meningkatnya fasilitasi prasarana dan sarana olahraga yang layak dan memenuhi standar	Peningkatan prasarana dan sarana olahraga yang mendukung prestasi	- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga - Pemeliharaan	5 buah  1 buah	10 buah  5 buah	Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Olah Raga	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			rutin /berkala sarana dan prasarana olahraga -					
4.	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	Peningkatan pembinaan olahraga prestasi	- Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah - Penyelenggaraan kompetisi olahraga	2 cabang  2 kali	10 cabang  5 kali	Program peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Olah Raga	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meningkatkan pendidikan politik masyarakat	Pendidikan politik masyarakat	Penertiban administrasi ormas dan LSM	Terprogram	Regulasi normatif	Program pendidikan politik masyarakat dan pembinaan kesatuan bangsa	Poilitik	Badan Kesatuan Bangsa, politik& Perlindungan Masyarakat
2.	Meningkatkan pengembangan wawasan	Pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan	Terprogram	Regulasi normatif	Program pengembangan wawasan	Kesatuan Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa,

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	kebangsaan		nilai – nilai luhur budaya bangsa			kebangsaan		politik& Perlindungan Masyarakat
3.	Memberdayakan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Pengaktifan satuan keamanan lingkungan	Terprogram	Regulasi normatif	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Kesatuan Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa, politik& Perlindungan Masyarakat
4.	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelaksanaan pengamanan wilayah Kabupaten Sragen	Terprogram	Regulasi normatif	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesatuan Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa, politik& Perlindungan Masyarakat
5.	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba	Terprogram	Regulasi normatif	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Kesatuan Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa, politik& Perlindungan Masyarakat
6.	Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terprogram	Regulasi normatif	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuan Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa, politik& Perlindungan Masyarakat

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

NO .	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meningkatkan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah	Peningkatan kapasitas lembaga DPRD	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	30	50	Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD	Otonomi Daerah	Sekretariat DPRD
2.	Meningkatnya pelayanan dalam persidangan dewan.	Peningkatan pelayanan dalam persidangan DPRD	Rapat koordinasi denga para kabag dan kasubag di kalangan sekwan.	12 kali	16 kali	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah	Otonomi Daerah	Sekretariat DPRD
3.	Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan rancangan perda tentang APBD, perbup tentang penjabaran APBD, perubahan APBD	3 bulan	3 – 4 bulan	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan Daerah	DPPKAD
4.	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Rancangan regulasi pengelolaan	3 bulan	4 bulan	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan	Keuangan Daerah	DPPKAD

NO .	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
			keuangan daerah			keuangan		
5.	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam keuangan daerah	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam keuangan daerah	- Penyusunan system informasi terhadap layanan publik - Meningkatnya kemudahan terhadap akses keuangan daerah dan akuntabilitas keuangan daerah	terprogram	Regulasi	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Kuangan Daerah	DPPKAD, Kantor PDE
6.	Meningkatkan kerja sama antar daerah	Peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah	Kerja sama dalam pelayanan publik	2 kali	4 kali	Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah	Pemerintahan Umum	Bag. Pemerintahan dan Pertanahan Setda
7.	Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan	Penataan peraturan perundang-undangan	Sosialisasi peraturan perundang – undangan	6 kali	10 kali	Program penataan peraturan perundang – undangan	Pemerintahan Umum	Bag. Pemerintahan dan Pertanahan Setda
8.	Meningkatkan Pendidikan kedinasan	Peningkatan pendidikan kedinasan	Pendidikan penjenjangan struktural	4 orang	6 orang	Program pendidikan kedinasan	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
9.	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pelatihan pra jabatan bagi calon PNS daerah	200 orang	250 orang	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah  Badan

NO .	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
								Pendidikan Latihan & Penelitian Pengembangan
10.	Membina dan Mengembangkan aparatur daerah	Pengembangan aparatur daerah	Analisis jabatan PNS	250 orang	300 orang	Program pembinaan dan pengembangan aparatur daerah	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
11.	Meningkatkan kelembagaan perangkat daerah	Peningkatan kelembagaan perangkat daerah	Penyusunan pedoman teknis perangkat daerah	Terprogram	Regulasi	Program kelembagaan perangkat daerah	Perangkat Daerah	Bag. Pemerintahan & Pertanahan Setda, Bag. Organisasi & Pegawai Setda
12.	Meningkatkan Ketatalaksanaan perangkat daerah	Peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah	Penyusunan standar pelayanan publik	1 kali	Terprogram dengan regulasi	Program ketatalaksanaan perangkat daerah	Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah  Bag. Organisasi & Pegawai Setda
13.	Mendayagunakan aparatur daerah	Pendayagunaan aparatur daerah	Sosialisasi kebijakan PAN daerah	1 kali	Regulasi	Program pendayagunaan aparatur daerah	Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah  Bag. Organisasi & Pegawai Setda Kabupaten
14.	Meningkatkan	Peningkatan koordinasi	Pembuatan	Terprogram	Regulasi	Program koordinasi	Pemerintah	Bag.

NO .	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	koordinasi bidang administrasi pembangunan	bidang administrasi pembangunan	pedoman pelaksanaan APBD	m		bidang administrasi pembangunan	han Umum	Pembangunan Setda kabupaten  Bappeda
15.	Meningkatkan pelayanan dan perijinan terpadu	Peningkatan pelayanan dan perijinan terpadu	Semakin bertambah nya jumlah investor	terprogram	meningkat	Program pelayanan dan perijinan terpadu	Pemerintah Umum	Badan Pelayanan Terpadu
16.	Menkoordinasikan terpadu bidang perekonomian	Koordinasi terpadu bidang perekonomian	Penguatan ekonomi sektor riil	terprogram	regulasi	Program koordinasi terpadu bidang perekonomian	Perekonomian	Bag. Sumber Daya Alam Setda Kabupaten
17.	Mengkoordinasikan bidang tata pemerintahan	Koordinasi bidang tata pemerintahan	Koordinasi penyusunan LKPJ	1 kali	1 kali tepat waktu	Program koordinasi bidang tata pemerintahan	Pemerintah Umum	Bag. Pemerintahan & Pertanahan Setda kabupaten Bappeda
18.	Mengkoordinasikan bidang pemerintahan desa	Koordinasi bidang pemerintahan desa	Inventaris kekayaan desa	Terprogram tiap tahun	Terprogram tiap tahun (Regulasi)	Program koordinasi bidang pemerintahan desa	Pemerintah Umum	Bag. Pemerintahan & Pertanahan Setda kabupaten
19.	Mengkoordinasikan bidang kesejahteraan rakyat	Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	Koordinasi penanganan masalah sosial	4 kali	8 kali	Program koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	Sosial	Bag. Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten
20.	Mengkoordinasikan bidang kehumasan	Koordinasi bidang kehumasan	Penerbitan tabloid	12 kali	12 kali	Program koordinasi bidang kehumasan	Kehumasan	Bag. Humas & Protokol Setda Kabupaten

NO .	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
21.	Menyelenggarakan keprotokolan daerah	Penyelenggaraan keprotokolan daerah	Penyelenggaraan keprotokolan	30 kali	45 kali	Program penyelenggaraan keprotokolan daerah	Kehumasan	Bag. Humas & Protokol Setda Kabupaten
22.	Menyediakan sandi dan telekomunikasi	Penyediaan sandi dan telekomunikasi	Perlengkapan sandi	terprogram	regulasi	Program sandi dan telekomunikasi	Sandi & telekomunikasi	Bag. Umum Setda Kabupaten
23.	Mengkoordinasikan dan pelayanan pada kecamatan	Koordinasi dan pelayanan pada kecamatan	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan desa	30	30 (Regulasi)	Program koordinasi dan pelayanan pada kecamatan	Pemerintahan Umum	Bag. Pemerintahan & Pertanahan Setda kabupaten
24.	Meningkatkan koordinasi dan pelayanan pada kelurahan	Peningkatan koordinasi dan pelayanan pada kelurahan	Pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan	15 kali	20 kali	Program koordinasi dan pelayanan pada kelurahan	Pemerintahan Umum	Bag. Pemerintahan & Pertanahan Setda kabupaten
25.	Meningkatnya sumber-sumber PAD	Peningkatan sumber-sumber PAD	Jumlah PAD meningkat	10%	20%	Program peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah	Keuangan Daerah	Bag. SDA Setda DPPKAD
26.	Memberdayakan potensi pendapatan daerah	Bermanfaatnya potensi Pendapatan daerah	Meningkatnya investasi daerah	5%	10%	Program pengembangan potensi pendapatan daerah	Keuangan Daerah	Bag. Sumber Daya Alam Setda kabupaten  Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah

NO .	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
								Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah
27.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih	Tewujudnya pemerintahan yang bersih	Terwujudnya pemerintahan yang bersih	terprogram	regulasi	Program penatalaksanaan pemerintah daerah		Bag. Organisasi & Kepegawaian Setda kabupaten  Badan Kepegawaian Daerah
28.	Meningkatkan layanan RT KDH/WKDH	Peningkatan layanan RT KDH/WKDH	Lancarnya layanan RT KDH/WKDH	terprogram	meningkat	Peningkatan layanan Kedinasan KDH/WKDH		Bag. Umum Setda kabupaten
29.	Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan desa	Peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan desa	Evaluasi rancangan Perdes ttg APBD desa	3 kali	5 kali	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		Bag. Pemerintahan & Pertanahan Setda kabupaten  Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

NO .	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
								Desa
30.	Meningkatkan SDM dalam perencanaan daerah	Peningkatan ketrampilan SDM dalam bidang perencanaan daerah	Seringnya dilakukan bintek	2 kali	4 kali	Program perencanaan daerah		Bag. Pembangunan Setda Kabupaten  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
31.	Mewujudkan pembentukan produk hukum daerah	Terbentuknya produk hukum daerah	a. Tersusunnya naskah akademik Raperda b. Asistensi Raperda c. Evaluasi Peraturan desa	5  8 4	10  50 20	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Bag. Hukum Setda Kabupaten
	Efektivitas pelaksanaan Produk hukum daerah	Kajian Peraturan perundang-undangan yang baru		50% 20	100% 50			
	Terwujudnya JDI hukum dan penyebarluasan per UU	Koleksi lengkap per UU	Penyusunan Prolega Pengkajian produk hukum daerah	2000 buku 80%	3500 buku 100%			
	Penyelenggaraan Bantuan hukum dan	Penyelenggaraan advokasi dan bantuan hukum serta pelaksanaan Pertahanan dan keamanan						

NO .	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
	peningkatan kesadaran Hukum masyarakat		a. Himpunan Pro Kumda b. Sosialisasi per UU  a. Penyelenggaraan advokasi b. Peningkatan kesadaran masyarakat sadar hukum	70%  70%	100%  100%			
32.	Mewujudkan pembentukan produk hukum daerah	Terbentuknya produk hukum daerah	Tersusunnya program Legislasi Daerah	14	20	Program penyusunan Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah dan perdes P		Bag. Hukum Setda Kabupaten
33.	Menyebarkan peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah	Tersusunnya koleksi lengkap peraturan perundang-undangan	Tersusunnya buku himpunan produk hukum daerah	14	20	Program Pembinaan/Evaluasi Produk Hukum Desa		Bag. Hukum Setda Kabupaten
34.	Meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum dan kesadaran hukum masyarakat	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Terbentuknya pembinaan Kadarkum	4	6	Program Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Bag. Hukum Setda Kabupaten
35.	Meningkatkan penyelenggaraan bantuan dan kesadaran hukum masyarakat	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang HAM	Dilakukannya sosialisasi HAM/RAN HAM	4	19	Program Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Bag. Hukum Setda Kabupaten

**SATPOL PP**

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
1.	Mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pelanggaran pekat, PGOT serta PSK berkurang	50	100	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Satpol PP  Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.	Meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat	Terwujudnya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat	60	100	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Satpol PP  Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Linmas
3.	Mengurangi peredaran pita cukai illegal	Terwujudnya kesadaran untuk mentaati peraturan	Pembinaan peredaran barang kena cukai	40	100	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Satpol PP  Badan kesatuan bangsa ,politik dan Linmas
4.	Mengurangi pelanggaran perda perijinan	Terwujudnya kesadaran masyarakat akan perda	Operasi perda perijinan dan penertiban	40	100	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan	Satpol PP  Badan kesatuan bangsa politik dan linmas
5.	Menertibkan pedagang asongan dan PKL yang tidak menempati lokasi yang telah ditentukan	Tertatanya pedagang asongan dan PKL pada tempat yang telah ditetapkan	Penyuluhan bagi PKL dan pedagang asongan	60	100	Penataan tempat berusaha bagi PKL pedagang asongan	Satpol PP  Badan kesatuan bangsa politik dan linmas
6.	Meningkatkan	Peningkatan SDM satpol PP	Kerja sama TNI,	60	100	Pemeliharaan	Satpol PP

	kapasitas serta profesionalisme Satpol PP		Polri dan Kejaksaan			kamtib-mas dan pencegahan tindak kriminal	
--	---	--	---------------------	--	--	---	--

#### INSPEKTORAT

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
1.	Meningkatkan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	Peningkatan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	Bertambahnya sarana prasarana perkantoran	Cukup	Tersedia cukup	Program pelayanan administrasi perkantoran	Inspektorat
2.	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Bertambahnya seragam aparatur	cukup	Cukup	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Inspektorat
3.	Meningkatkan SDM di bidang pengawasan	Peningkatan SDM di bidang pengawasan	Frekuensi pelatihan/bintek bidang pengawasan	2	6	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Inspektorat
4.	Meningkatkan pengawasan laporan	Peningkatan laporan kinerja tepat waktu dan	Pelaksanaan pengawasan	terprogram	Regulasi dan tepat	Program peningkatan	Inspektorat

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
	kinerja tepat waktu dan kredibel	kredibel	dapat efektif		waktu	pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
5.	Meningkatkan sistem pengawasan dan penyelamatan kebijakan KDH	Peningkatan sistem pengawasan dan penyelamatan kebijakan KDH	Meningkatnya pengawasan internal dengan baik	3	5	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
6.	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemeriksa	Peningkatan profesionalisme aparatur pemeriksa	Semakin besar jumlah aparat yang terlatih/ bintek	6	10	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan
7.	Menyempurnakan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusun kebijakan/aturan tentang Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Regulasi sesuai aturan lama	Regulasi sesuai aturan baru	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan	Inspektorat Bag. Hukum Setda kabupaten
8.	Meningkatkan kecepatan dan akurasi data pengawasan	Peningkatan kecepatan dan akurasi data pengawasan	Terbangun Sistem Informasi Manajemen Pengawasan	-	1	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Inspektorat Kantor Pengelola Data Elektronik
9.	Meningkatkan respon	Peningkatan respon terhadap aduan	Terbentuk unit	Rintisan-	1	Program	Inspektorat

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
	terhadap aduan masyarakat	masyarakat	penanganan pengaduan masyarakat			Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	
10.	Meningkatkan penyederhanaan perijinan	Peningkatan penyederhanaan ijin usaha	Lama ijin dipersingkat	3 hari	1 hari	Program penyederhanaan perizinan	Badan Pelayanan Terpadu
11.	Meningkatkan pengelolaan aset daerah	Peningkatan pengelolaan aset daerah	Optimalisasi aset daerah	Terprogram	Regulasi	Program aksi peningkatan pengembangan pengelolaan aset daerah	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
12.	Meningkatkan pencegahan KKN	Berkurangnya adanya KKN	Fakta integritas bagi pejabat	Terprogram	Regulasi	Program aksi percepatan anti korupsi, kolusi dan nepotisme	Inspektorat  Badan kepegawaian Daerah

#### **BADAN PERIJINAN TERPADU**

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
1.	Meningkatkan promosi dan kerjasama industri	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penyelenggaraan pameran investasi	1 kali	2 kali	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Badan Pelayanan Terpadu
2.	Meningkatkan iklim investasi dan realisasi	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Memfasilitasi dan koordinasi	4780 penonton	Pengecekan dan kajian	Program peningkatan iklim	Badan Pelayanan

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
	investasi		kerjasama di bidang investasi		teknis lapangan	investasi dan realisasi investasi	Terpadu
3.	Meningkatkan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah	Penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	1 kali	Data kajian potensi investasi	Program penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah	Badan Pelayanan Terpadu
4.	Meningkatkan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat (survey kepuasan pelanggan)	2 kali	2 kali	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Badan Pelayanan Terpadu
5.	Meningkatkan Pelayanan dan perijinan terpadu	Peningkatan pelayanan dan perijinan terpadu	Penyusunan raperda penanaman modal	1 kali	Regulasi penanaman modal	Program pelayanan dan perijinan terpadu	Badan Pelayanan Terpadu Bag. Hukum Setda kabupaten

#### BADAN DIKLAT DAN LITBANG

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	SKPD
-----	---------	----------------	-----------	-----------------	---------	------

			<b>KINERJA</b>	<b>KONDISI AWAL</b>	<b>KONDISI AKHIR</b>	<b>PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
1.	Membangun SDM yang unggul dan berdaya saing	Peningkatan kesempatan untuk memperoleh pelatihan sesuai dengan basic pendidikan	Lulusan pelatihan ketrampilan dan pelatihan, bersertifikat, mampu mandiri dan dapat diterima sesuai dengan bidang keahlian dengan jumlah lulusan 2.500 orang/tahun	30	50	Program peningkatan keahlian bagi calon tenaga kerja baru	Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan
2.	Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis desa	Pendirian inkubator bisnis di setiap kecamatan 5 desa	Adanya globalisasi seluruh kecamatan diharapkan memiliki inkubator bisnis setiap tahun 5 desa di masing-masing kecamatan	50	80	Program pembangunan dan pengembangan inkubator bisnis di seluruh kecamatan Kabupaten Sragen	Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan
3.	Mendayagunakan pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan prouktivitas	Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan teknologi yang sedang berkembang saat ini	Inovasi teknologi pengembangan kualitas produk	2 paket	4 paket	Program pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja	Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan
4.	Meningkatkan sumber daya aparatur sesuai dengan SOT	Setiap aparatur kompeten dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja	Pejabat struktural/fungsional dan staff mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi	12	20	Program peningkatan kesempatan diklat teknis dan fungsional sesuai dengan tupoksi bagi aparatur	Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
						pemerintah	
5.	Meningkatkan Penelitian pengembangan	Penelitian pengembangan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat	Semakin meningkatnya kemampuan peserta pelatihan dalam perkembangan IPTEK	3 paket	6 paket	Program diversifikasi produk pelatihan	Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan
6.	Menyediakan tenaga kepelatihan dan instruktur badan diklat dan litbang yang bersertifikasi sebagai assesor	Penyediaan Tenaga kepelatihan dan instruktur badan diklat dan litbang yang bersertifikasi sebagai assesor	Terwujudnya tenaga kepelatihan dan instruktur badan diklat dan litbang yang bersertifikasi sebagai assesor	16	30	Program pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah (sertifikasi assessor) dengan mengikutsertakan tenaga kepelatihan, instruktur untuk uji kompetensi dan uji assessor serta terdaftar sebagai assessor	Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan
7.	Mencetak SDM yang unggul dan berdaya saing melalui sertifikasi kompetensi profesi	Terwujudnya siswa pelatihan badan diklat dan litbang yang bersertifikasi uji kompetensi profesi	Siswa lulusan pelatihan badan diklat dan litbang yang bersertifikasi kompetensi profesi	15	20	Program peningkatan kesempatan kerja (peningkatan kualitas lulusan pelatihan) dengan mengikutsertakan uji kompetensi profesi	Badan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 21. URUSAN KETAHANAN PANGAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
1.	Meningkatnya ketahanan pangan dan kemandirian pangan	Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan	a. Ketersediaan energi dan protein per kapita	Ketersediaan energi 1991,4 kkal/kap/hari	Ketersediaan energi 2200 kkal/kap/hari	Program peningkatan diversifikasi pangan	Kantor Ketahanan Pangan  Dinas Pertanian
			b. Penguatan cadangan pangan	Ketersediaan pangan 61,7	Ketersediaan pangan 63		
			c. Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan	Ada	Ada		
			d. Stabilitas harga pangan	Stabil	Stabil		
			e. Peningkatan skor pola pangan harapan	78,9	95,8		
			f. Pembinaan/ pengawasan keamanan pangan	1 kali	5 kali		
			g. Penanganan daerah rawan pangan	1 kali	5 kali		

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
2.	Mengembangkan pendekatan sistem agribisnis	Pengembangan sistem agribisnis	Peningkatan pola kemitraan	6	8	Program pengembangan agrobisnis	Kantor Ketahanan Pangan
3.	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan pangan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan pangan	Pengembangan program lokal	25	35	Program swadaya pangan dan swasembada pangan berkelanjutan	Kantor Ketahanan Pangan
4.	Meningkatkan ketahanan pangan	Peningkatnya ketahanan pangan di wilayah Kab. Sragen	Meningkatnya ketahanan pangan	terprogram	regulasi	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Kantor Ketahanan Pangan  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	Meningkatkan ketersediaan energi dan protein per kapita/hari	Tersedianya energi dan protein perkapita/hari	Tercukupinya energi dan protein	2 paket	4 paket	Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
6.	Mencukupinya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat	Tercapainya distribusi pangan dengan cukup	Stabilitas pangan terjaga	2 unit	4 unit	Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Kantor Ketahanan Pangan  Dinas Perdagangan
7.	Menurunnya	Pengembangan	Diversifikasi	2 unit	4 unit	Program	Kantor

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
	konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 %	diversifikasi pangan	pangan			Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Ketahanan Pangan

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
1.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan	a. Koordinasi penanggulang an kemiskinan b. Peningkatan keg PKK c. Peningkatan keg P2MGB d. Bintek peng LP"MD e. Revitalis Posyandu	18,68 %  208 desa  2 desa  10 desa  1 desa	13,8 %  208 desa  10 desa  208 desa  10 desa	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan masyarakat Desa  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Meningkatkan partisipasi	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam	a. Pelaksanaan Musrenbangda	1 kali	2 kali	Program peningkatan	Badan Keluarga

	masyarakat dalam membangun	membangun	b. Alokasi dana desa c. PNPM-MP d. Pemugaran rumah e. Penataan lingkungan f. Sarana air bersih g. TMMD sengkuyung h. Desa berkembang	196 desa 18 kec 30 kk 4 desa 6 desa 2 desa 11 desa	196 desa 18 Kec 90 kk 12 desa 14 desa 10 desa 60 desa	partisipasi masyarakat dalam membangun	Berencana dan Pemberdayaan masyarakat Desa
3.	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Diklat pamong desa di bidang keuangan desa	2 kali	4 kali	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan masyarakat Desa Bag. Pemerintahan dan Pertanahan Setda Kabupaten
4.	Meningkatkan peran perempuan di desa	Peningkatan peran perempuan di desa	Pelatihan peran wanita dalam usaha ekonomi produktif	2 kali	4 kali	Program peningkatan peran perempuan di desa	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan masyarakat Desa Bag

							Pemberdayaan Perempuan Setda kabupaten
5.	Mengembangkan lembaga ekonomi pedesaan	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pelatihan ketrampilan lembaga ekonomi Masyarakat BUMDES Pengembangan TTG	2 kali	6 kali	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan masyarakat Desa  Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM
6.	Meningkatkan pengembangan data	Peningkatan pengolahan data	Bintek kader KPM Profil desa	280 orang 208 desa	370 orang 208 desa	Program pengembangan data	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan masyarakat Desa
7.	Meningkatkan koordinasi pengentasan kemiskinan	Peningkatan koordinasi Pengetasan kemiskinan	Bintek upaya UPPKS	20 kecamatan	20 kecamatan dan regulasinya	Program pengentasan kemiskinan	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan masyarakat Desa  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 23. URUSAN STATISTIK

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
1.	Meningkatkan pengembangan data / informasi / Statistik daerah	Pengembangan data / informasi	Pengumpulan data Sragen dalam angka	1 kali	1 kali	Program pengembangan data / informasi / statistik daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 24. URUSAN KEARSIPAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
1.	Meningkatkan perbaikan sistem administrasi kearsipan	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Membuat data base tentang kearsipan	1 kali	Regulasi	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kantor Arsip dan dokumentasi
2.	Meningkatkan penyelamatan dan pelestarian dokumen	Penyelamatan dan pelestarian dokumen	Penataan kearsipan	100 boks	500 boks	Program penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Kantor Arsip dan dokumentasi
3.	Meningkatkan Pemeliharaan rutin / berkala	Peningkatan pemeliharaan rutin / berkala	Pelaporan kondisi situasi data	50	200	Program pemeliharaan rutin / berkala	Kantor Arsip dan Dokumentasi
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan informasi	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Penerbitan naskah sumber arsip		terprogram	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Kantor Arsip dan Dokumentasi
5.	Meningkatkan sarana dan prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana	Pengadaan sarana dan	terprogram	Regulasi	Program peningkatan sarana	Kantor arsip dan

	kearsipan	kearsipan	prasarana kearsipan			dan prasarana	dokumentasi
6.	Meningkatkan kualitas pelayanan	Peningkatnya kualitas pelayanan umum	Penyusunan data base arsip daerah dan SKPD	terprogram	regulasi	Program Jaringan informasi kearsipan nasional	Kantor Arsip dan Dokumentasi

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meningkatkan pengembangan komunikasi informasi dan media massa	Pengembangan komunikasi informasi dan media massa	Pengadaan alat studio dan komunikasi	3 buah	6 buah	Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.	Melaksanakan Pengkajian penelitian bidang komunikasi dan informasi	Pelaksanaan penelitian di bidang komunikasi dan informasi	Kajian komunikasi dan informasi	1 kali	1 kali	Program kajian dan penelitian tentang komunikasi dan informasi		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3.	Meningkatkan SDM bidang komunikasi dan informasi	Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan jurnalistik	1 kali	2 kali	Program peningkatan SDM yang menangani komunikasi dan informasi		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
4.	Meningkatkan kerjasama dengan pihak media massa	Peningkatan kerjasama dengan media massa	Penyebaran informasi pembangunan	80 kali	100 kali	Program kerja sama dengan media massa		Dishub Komunikasi dan informatika
5.	Menguatkan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah	Penguatan kelembagaan dalam komunikasi dan informasi	Pendayagunaan media center daerah	2 kali	4 kali	Program penguatan kelembagaan dalam komunikasi dan informasi		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
6.	Meningkatkan tata laksana komunikasi dan informatika	Peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika daerah	Kompetensi bidang kehumasan	4 kali	6 kali	Program peningkatan tata laksana komunikasi		Dinas Perhubungan, Komunikasi

	daerah					dan informatika daerah		dan Informatika
7.	Meningkatkan fasilitas SDM bidang komunikasi dan informasi	Peningkatan fasilitas SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatkan pelatihan SDM	2 kali	4 kali	Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

6.	Berkembangnya komunikasi, informasi dan media massa	Mengembangkan komunikasi, informasi dan media massa	Pembuatan majalah Info Sukowati	12 kali	12 kali	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa		Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Bag Humas dan Protokol Setda
7.	Terwujudnya kerjasama informasi dengan media massa	Mewujudkan kerjasama informasi dengan media massa	Dialog interaktif di TV	3 kali	6 kali	Program kerja sama informasi dengan media massa		Bag Humas dan Protokol Setda
6.	Membina Pemilik Radio komunitas di wilayah Kabupaten Sragen	Pelayanan bidang informasi dan komunikasi di wilayah Kabupaten Sragen	Pembinaan dan pengawasan antene pemancar penguat	100	180	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi		Bag Humas dan Protokol Setda

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 26. URUSAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1.	Meningkatnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Penyuluhan program budaya baca	Terprogram	Regulasi	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Perpustakaan Daerah	Kantor Perpustakaan Daerah
2.	Menyelamatkan dan melestarikan koleksi pustaka	Penyelamatan koleksi pustaka	Pendataan karya cetak dan karya rekam	2 kali	4 kali	Program penyelamatan dan pelestarian koleksi pustaka	Perpustakaan Daerah	Kantor Perpustakaan Daerah
3.	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan pelayanan Kepada masyarakat	Terpeliharanya sarana dan prasarana	terprogram	regulasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perpustakaan Daerah	Kantor Perpustakaan Daerah
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum	Peningkatan kualitas Pelayanan administrasi umum	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	terprogram	meningkat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perpustakaan Daerah	Kantor Perpustakaan Daerah

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### B. Urusan Pilihan

#### 1. URUSAN PERTANIAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
1.	Meningkatkan kesejahteraan petani	Peningkatan kesejahteraan petani	Pelatihan petani tentang agribisnis	4 kali	8 kali	Program peningkatan kesejahteraan petani alam arti luas	Dinas Pertanian
2.	Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Pemeliharaan produksi pertanian	15 obyek	20 obyek	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Dinas Pertanian Dinas Perdagangan
3.	Meningkatkan penerapan teknologi pertanian	Peningkatan penerapan teknologi pertanian	Pelatihan penerapan teknologi pertanian	4 kali	6 kali	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	Dinas Pertanian Badan Pelaksana Penyuluhan
4.	Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan	Terberdayanya penyuluh lapangan	Pengembangan desa wisata agro	3 obyek	6 obyek	Program pembudayaan penyuluh lapangan	Dinas Pertanian Badan Pelaksana Penyuluhan
5.	Meningkatkan produk pertanian	Peningkatan produk pertanian	Peningkatan produksi pertanian (jagung)	terprogram	Meningkat	Program peningkatan produksi pertanian	Dinas Pertanian Badan

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
							Pelaksana Penyuluhan
6.	Menanggulangi penyakit ternak	penanggulangan penyakit ternak	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	10 kali	20 kali	Program penanggulangan penyakit ternak	Dinas Peternakan dan Perikanan  Dinas Perdagangan
7.	Meningkatkan produksi hasil peternakan	Peningkatan produksi hasil peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	terprogram	regulasi	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Dinas Peternakan dan Perikanan
8.	Meningkatkan penerapan teknologi peternakan	Peningkatan teknologi peternakan	Pelatihan teknologi peternakan teknologi tepat guna	12 kali	16 kali	Program penerapan teknologi peternakan	Dinas Peternakan dan Perikanan
9.	Meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan hasil produksi peternakan	Hasil produksi peternakan masyarakat	terprogram	meningkat	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Dinas Peternakan dan Perikanan
10.	Mengembangkan jaringan irigasi	Pengembangan jaringan irigasi	Pengembangan irigasi tanah dangkal	36 km	45 km	Program pengembangan jaringan irigasi	Dinas Pertanian  Dinas Pekerjaan Umum
11.	Mengembangkan pertanian organik	Pengembangan pertanian organik	Pengembangan rumah kompos	12 obyek	18 obyek	Program pengembangan pertanian organik	Dinas Pertanian

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
							Badan Pelaksana Penyuluhan
12.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani	Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani	1793	1801	Program peningkatan kapasitas kelembagaan petani	Dinas Pertanian  Badan Pelaksana Penyuluhan
13.	Meningkatkan penyediaan sarana produksi pertanian	Peningkatan penyediaan sarana produksi pertanian	Penyediaan alat pasca panen pedal thresher	87	98	Program penyediaan sarana produksi pertanian	Dinas Pertanian
14.	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan hama	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan hama	Pengawasan Jalur Benih Antar Lapang (JABAL)	Terprogram	Meningkat dalam regulasi	Program pencegahan dan penanggulangan hama	Dinas Pertanian  Badan Pelaksana Penyuluhan
15	Meningkatkan ketahanan pangan	Peningkatan ketahanan pangan	Pembuatan kompos dari jerami	2 kali	4 kali	Program pengembangan ketahanan pangan	Dinas Pertanian  Kantor Ketahanan pangan
16	Meningkatkan produksi hortikultura berkelanjutan	Peningkatan produksi Hortikultura berkelanjutan	Pengembangan kawasan buah	2 lokasi	3 lokasi	Program peningkatan produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan	Dinas Pertanian  Dinas Kehutanan dan

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
							Perkebunan
17	Mengembangkan kawasan hortikultura	Berkembangnya kawasan hortikultura	Adanya heregistrasi lahan hortikultura	1 kali	3 kali	Program pemberdayaan petani pengembangan kawasan hortikultura	Dinas Pertanian  Dinas Kehutanan dan Perkebunan
18	Meningkatkan pendapatan petani hortikultura	Peningkatan pendapatan petani hortikultura	Pelatihan sertifikasi produksi bidang hortikultura	1 kali	3 kali	Program peningkatan produksi dan pendapatan petani bidang hortikultura	Dinas Pertanian
19	Meningkatkan ketahanan pangan dari aspek ternak	Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ternak	Jumlah pembuat kompos jerami bertambah	15	30 lokasi	Program peningkatan ketahanan pangan termasuk asal ternak	Dinas Peternakan dan Perikanan  Kantor Ketahanan Pangan
20	Meningkatkan agri bisnis dan agri industri dari usaha peternakan	Peningkatan usaha agri bisnis dan agri industri dari usaha peternakan	Jumlah pengrajin Agribisnis dan industri dari usaha ternak	terprogram	meningkat	Program pengembangan agri bisnis dan agro industri dari peternakan	Dinas Peternakan dan Perikanan  Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM
21	Meningkatkan pengarusutamaan	Peningkatan pengarusutamaan	Jumlah wanita yang ikut kursus	4 orang	8 orang	Program pelembagaan	Dinas Peternakan

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
	gender dalam bidang peternakan	gender dalam bidang peternakan	meningkat			pengarusutamaan gender dalam pembangunan peternakan dan perikanan	dan Perikanan Bag. Pemberdayaan Perempuan Setda Kabupaten

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 2. URUSAN KEHUTANAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
1.	Meningkatkan Pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Optimalisasi pola hutan rakyat	21.974,99 ha	222.474,99 ha	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2.	Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan	2 kali	7 kali	Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
3.	Meningkatkan pelayanan publik urusan kehutanan	Peningkatan pelayanan publik pelayanan kehutanan	Pengesahan hasil hutan	2,3 %	4,6 %	Program pelayanan publik urusan kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
4.	Mengembangkan	Pengembangan sistem	Penyusunan	5 kali	10 kali	Program	Dinas

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
	sistem informasi geografi kehutanan	informasi geografi	data dan statistic kehutanan			pengembangan sistem informasi geografi	Kehutanan dan Perkebunan
5.	Meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan kemasyarakatan	Pemanfaatan kawasan hutan kemasyarakatan	Pertanian tanaman musiman	1,04 %	2,8 %	Program pemanfaatan kawasan hutan kemasyarakatan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
6.	Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan	Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan	Pembuatan bibit / benih tanaman kehutanan	1.381.584 batang	2.006.584 batang	Program peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
7.	Meningkatkan pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Pengelolaan industri hasil hutan	Terprogram	Regulasi	Program peningkatan pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
8.	Merencanakan dan mengembangkan hutan	Perencanaan dan pengembangan hutan	Pendampingan kelom usaha hutan rakyat lestari	1 kelompok	3 kelompok	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
10.	Meningkatkan pengendalian kebakaran hutan	Peningkatan pengendalian kebakaran hutan	Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan	3	6	Program pengendalian kebakaran hutan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
1.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Peningkatan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Sosialisasi regulasi bahan galian C	2 kali	4 kali	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Bag Sumber Daya Alam Setda Kabupaten
2.	Meningkatkan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Peningkatan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi	4 kali	8 kali	Program peningkatan pengawasan dan penertiban kegiatan yang merusak lingkungan	Bag Sumber Daya Alam Setda Sragen  Badan Lingkungan Hidup
3.	Meningkatkan pelayanan usaha pertambangan	Peningkatan pelayanan usaha pertambangan	Pembinaan penambang liar	6 kali	8 kali	Program peningkatan pelayanan usaha pertambangan	Bag Sumber Daya Alam Setda Kabupaten  Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM
4.	Meningkatkan regulasi energi sumber daya dan mineral	Peningkatan regulasi energi sumber daya dan mineral	Regulasi pertambangan umum	1 kali	Regulasi	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Bag Sumber Daya Alam Setda Kabupaten
5.	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan potensi dan	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan potensi dan teknologi	Pemetaan cekungan air tanah	2 obyek	4 obyek	Program pengelolaan dan pengembangan potensi dan	Bag Sumber Daya Alam Setda Kabupaten

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
	teknologi geologi	geologi				teknologi geologi	
6.	Meningkatkan regulasi energi dan sumber daya mineral	Peningkatan regulasi energi dan sumber daya mineral	Kecukupan energi sumber daya dan mineral	terprogram	regulasi	Program peningkatan regulasi energi sumber daya dan mineral	Bag Sumber Daya Alam Setda Kabupaten  Bag Hukum Setda Kabupaten

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 4. URUSAN PARIWISATA

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
1.	Meningkatkan Pengembangan pemasaran pariwisata	Peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata	a. Pelatihan pemandu wisata terpadu b. Kerja sama promosi pariwisata c. cetak bahan	1 kali  1 paket  5000 eks	4 kali  3 paket  10.000 eks	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, pemuda dan Olah Raga

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
			pendukung promosi pariwisata				
2.	Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata	Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata	a. Membuat paket wisata unggulan b. Pengembangan Obyek wisata Unggulan c. Diklat bagi petugas obyek wisa	2 paket  1 paket  20 orang	4 paket  3 paket  60 orang	Program pengembangan destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
3.	Mengembangkan kemitraan	Pengembangan kemitraan	a. Pembinaan sektor pendukung pariwisata b. Pembinaan dan Pelatihan pelaku usaha jasa wisata	2 pokdarwis  20 orang	4 pokdarwis  40 orang	Program pengembangan kemitraan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
4	Meningkatkan sarana dan prasarana pada asset-aset wisata yang ada	Peningkatan pemeliharaan asset-aset wisata yang ada	Meningkatnya jumlah anggaran Pemeliharaan asset wisata	terprogram	meningkat	Program peningkatan Layanan wisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
1.	Meningkatkan pengembangan budidaya perikanan	Peningkatan pengembangan budidaya perikanan	Pengembangan bibit ikan unggul	3 obyek	6 obyek	Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
2.	Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap	Peningkatan pengembangan perikanan tangkap	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	3 obyek	6 obyek	Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.	Meningkatkan pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Promosi hasil perikanan	2 kali	4 kali	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
4.	Mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran perikanan	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan	Pemasaran produk perikanan	3 lembaga	4 lembaga	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 6. URUSAN PERDAGANGAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
1.	Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	20 kali	25 kali	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Dinas Perdagangan
2.	Meningkatkan Peningkatan dan pengembangan ekspor	Peningkatan dan pengembangan ekspor	Membangun jejaring dengan eksportir	4 obyek	8 obyek	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Dinas Perdagangan
3.	Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Kelembagaan kerja sama kemitraan	20 mitra	25 mitra	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Dinas Perdagangan
4.	Meningkatkan pembinaan pedagang keliling dan asongan	Pembinaan pedagang keliling dan asongan	Penyuluhan disiplin pedagang keliling dan asongan	6 kali	12 kali	Program pembinaan pedagang keliling dan asongan	Dinas Perdagangan

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 7. URUSAN PERINDUSTRIAN

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
1.	Meningkatkan kapasitas IPTEK sistem produksi	Peningkatan kapasitas IPTEK system produksi	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	8 obyek	20 obyek	Program peningkatan kapasitas IPTEK system produksi	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM
2.	Meningkatkan Pengembangan industri kecil dan menengah	Peningkatan pengembangan industri kecil dan menengah	Pemberian fasilitas kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Terprogram	Regulasi	Program pengembangan industry kecil dan menengah	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM
3.	Meningkatkan kemampuan teknologi industri	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	8 obyek	20 obyek	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM
4.	Menata struktur industri	Penataan struktur industri	Pembinaan keterkaitan produk hulu – hilir	6 obyek	15 obyek	Program penataan struktur industri	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM
5.	Mengembangkan sentra – sentra industry potensial	Pengembangan sentra – sentra industri potensial	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	1 obyek Terprogram	12 obyek Regulasi	Program pengembangan sentra – sentra industry potensial	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SRAGEN

### 8. URUSAN TRANSMIGRASI

NO.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD
				KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
1.	Mengembangkan wilayah transmigrasi	Pengembangan wilayah transmigrasi	Kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	3 obyek Terprogram	4 obyek Regulasi	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.	Meningkatkan transmigrasi regional	Peningkatan transmigrasi regional	Penyuluhan transmigrasi regional	4 kali	8 kali	Program transmigrasi regional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5.	Mengembangkan wilayah transmigrasi	Berkembangnya wilayah Transmigrasi kemitraan	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	2 kali	4 kali	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
6.	Meningkatkan penyuluhan	Peningkatan penyuluhan transmigrasi	-Penyuluhan transmigrasi	4 kali	6 kali	Program Transmigrasi		Dinas Tenaga Kerja &

	transmigrasi regional	regional	regional -Pelatihan transmigrasi regional			Regional		Transmigrasi
--	--------------------------	----------	--	--	--	----------	--	--------------